

Pergerakan Mahasiswa Pada Masa Hindia Belanda



Direktorat
Kebudayaan

2

Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia
1926-1942

Museum Sumpah Pemuda
Jakarta

**Pergerakan
Mahasiswa
Pada Masa
Hindia Belanda
Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia
1926-1942**

**Pergerakan Mahasiswa
Pada Masa Hindia Belanda
Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia
1926-1942**

**Momon Abdul Rahman
Darmansyah
Kusumo Wardoyo
Siti Sugi Winarti
Misman**

Cetakan Pertama

Museum Sumpah Pemuda

**Pergerakan Mahasiswa Pada Masa Hindia Belanda
Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia
1926-1942**

Diterbitkan oleh
Museum Sumpah Pemuda
Jl. Kramat Raya No. 106, Jakarta 10420
Telp. 3103217, 3154546; Fax. 3154546 ext 18

Penyunting: Tjahjopurnomo SJ
Tata letak: Momon, Dadank
Desain muka: Agus Nugroho

Cetakan Pertama 2006
Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk
keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Pendahuluan

Mahasiswa identik dengan perubahan dan perlawanan terhadap kemapanan. Mahasiswa memposisikan diri sebagai lawan dari rezim yang berkuasa. Dalam sejarah Indonesia kita mengenal mahasiswa Angkatan 1928, Angkatan 1945, Angkatan 66, Angkatan 74, Angkatan 78, Angkatan 80, dan Angkatan 98.

Pergerakan mahasiswa muncul bersamaan dengan berdirinya perguruan tinggi di Indonesia. Tercatat Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung) sebagai perguruan tinggi pertama di Hindia Belanda. Pendirian perguruan tinggi ini disusul pendirian Geneskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia.

Sebagai perhimpunan mahasiswa pertama di Hindia Belanda adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia disingkat PPPI. Sebutan "mahasiswa" yang saat itu diusulkan Muhammad Yamin belum diterima secara umum. Istilah "maha" dalam mahasiswa

dianggap berlebihan. Perhimpunan mahasiswa yang didirikan pada bulan September 1926 ini menjadi inti dari pergerakan pemuda Indonesia. Mereka adalah penggagas Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Walau jumlah mahasiswa saat itu sedikit, di kalangan pergerakan pemuda, PPPI mempunyai pengaruh yang besar. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan mereka yang lebih tinggi dari anggota perhimpunan pemuda yang lain, anggotanya adalah mahasiswa sekolah tinggi seperti RHS, GHS, THS, dan Stovia kelas Tinggi (7 – 10), sedangkan perhimpunan pemuda yang lain anggotanya adalah pelajar sekolah menengah seperti MULO dan AMS. Selain itu, banyak anggota PPPI yang merangkap menjadi pemimpin perhimpunan pemuda kedaerahan, seperti Muhammad Yamin di Jong Sumatranen Bond, R.T. Soenardi Djaksodipuro di Jong Java.

Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia berpusat di sebuah gedung yang terletak di jalan Kramat Nomor 106 atau saat itu dikenal dengan nama Wisma Indonesia (Indonesische Clubgebouw). Di sini mereka aktif membicarakannya masa depan Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) melakukan kajian atas berbagai model negara dan revolusi. Ratusan buku klasik tentang politik dan ketatanegaraan dibaca dan didiskusikan. Beragam model dan bentuk negara diperdebatkan.

Sayangnya, peran penting PPPI kurang mendapat perhatian dalam penulisan sejarah nasional. Untuk itu, kami mencoba membuat tulisan tentang **Pergerakan Mahasiswa pada masa Hindia Belanda : Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia 1926-1942.**

Jakarta, Oktober 2006.

Penulis.

Kata Pengantar

KEPALA MUSEUM SUMPAAH PEMUDA

Sebagai museum yang mengkhususkan diri pada koleksi yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai yang berhubungan dengan Sejarah Sumpah Pemuda. Berkenaan dengan itu kami menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda.

Pada kesempatan ini kami meluncurkan buku Pergerakan Mahasiswa Pada Masa Hindia Belanda Kajian Atas Peranan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) 1926-1942.

Selama ini kita akui buku-buku yang membahas pergerakan Pemuda yang terkait dengan Sumpah Pemuda sangat terbatas.

Kami mengharapkan penerbitan buku ini dapat membantu mengatasi kekurangan informasi tentang sejarah pergerakan Pemuda yang terkait dengan Sumpah Pemuda. Terlebih lagi bila diingat bahwa pergerakan Pemuda telah membawa bangsa ini menuju kemerdekaannya, melalui tonggak-tonggak sejarah antara lain Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan deklarasi Sumpah Pemuda.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami memerlukan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan buku ini di masa mendatang.



Daftar Isi

	hal
Pendahuluan.....	v
Kata Pengantar Kepala Museum Sumpah Pemuda.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Istilah.....	xiii
Bab 1 Munculnya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.....	1
1. 1 Tumbuhnya Pendidikan Tinggi di Hindia Belanda.....	1
1. 2 Munculnya Kelompok Mahasiswa.....	4
1. 3 Mahasiswa dan Nasionalisme.....	5
1. 4 Pengaruh Media Massa.....	9
1. 5 Pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia....	10
Bab 2 Kongres Pemuda dan Gagasan Fusi PPPI.....	15
2. 1 Kongres Pemuda Pertama.....	15
2. 2 PPPI dan Kongres Pemuda Pertama.....	19
2. 3 Gagasan Fusi PPPI.....	24

Bab 3 Gedung Kramar 106 dan Kiprah PPPI.....	29
3. 1 Gedung Kramat 106.....	29
3. 2 Kiprah PPPI di Bidang Pendidikan.....	33
3. 3 Kiprah PPPI di Bidang Politik	36
Bab 4 Hubungan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dengan Perhimpunan Pemuda Lainnya.....	41
4. 1 PPPI dan Perhimpunan Indonesia.....	41
4. 2 PPPI dan Jong Java.....	43
4. 3 PPPI dan Jong Indonesia.....	45
4. 3 PPPI dan Indonesia Muda.....	48
Bab 5 Masa Surut PPPI.....	53
5. 1 Tekanan Politik Pemerintah Kolonial.....	53
5. 2 Munculnya Berbagai Perhimpunan Pelajar Baru.....	56
5. 3 Kedatangan Jepang di Indonesia.....	58
Daftar Sumber.....	63
Lampiran.....	67

DAFTAR SINGKATAN

AMS	: Algemeene Middelbare School
ELS	: Europesche Lagere School
THS	: Technische Hogeschool
HBS	: Hogere Burger School
PID	: Politieke Inlichtingen Dienst
RHS	: Rechtskundige Hogeschool
GHS	: Geneeskundige Hogeschool,
RS	: Rechtsschool
Stovia	: School tot Op;eiding van Indlansch Artsen
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
AMS	: Algemeene Middelbare School

DAFTAR ISTILAH

De nieuwen van Indië : India (Indonesia) Baru.

Geneskundige hoogeschool : Sekolah Tinggi Kedokteran mulai menerima siswa pada 1927. Sekolah yang terletak di jalan Salemba 4 ini didirikan untuk menggantikan Stovia yang dibangun pada 1902.

Fusi : meleburnya beberapa perhimpunan ke dalam sebuah perhimpunan yang baru sama sekali

HBS : Hoogere Burgerschool adalah sekolah lanjutan ELS khusus untuk anak-anak golongan Eropa. Dengan syarat tertentu dapat juga diterima anak-anak dari golongan lain. HBS ini ada 2 macam, yaitu HBS 3 tahun dan HBS 5 tahun (HBS V). HBS Batavia dikenal sebagai Koning Willem III (KW III, Kawe drie).

Indonesische Clubgebouw: Gedung pertemuan Indonesia adalah sebuah gedung yang terletak di Kramatweg 106, Weltevreden (jalan Kramat 106) Jakarta yang menjadi pusat aktivitas mahasiswa pergerakan nasional. Gedung ini menjadi sekretariat PPPI dan tempat diskusi mahasiswa aktivis pergerakan.

Indonesische Clubhuis : Wisma Indonesia

Konservatif : Faham politik yang berdasarkan tradisi lama, cenderung keras dan kaku.

Liberalisme : Faham politik kebebasan, yang memberikan kewenangan kepada kelompok politik yang menang biasanya kelompok yang menang dikuasai kelompok kaya.

Politik Etis : Politik Balas Budi

Quo Vadis : Mau dibawa ke mana?

Rechtshoogeschool : Sekolah Tinggi Hukum

Stovia : School Tot Opleiding Van Inland Artsen, Sekolah Kedokteran Bumiputera.

Theosof : Orang yang menekuni aliran kepercayaan

Volksraad : Dewan Rakyat.

Bab 1

Munculnya Perhimpunan Pelajar- Pelajar Indonesia

1.1 Tumbuhnya Pendidikan Tinggi di Hindia Belanda

PENDIDIKAN formal pada masa penjajahan Belanda selain langka, juga memegang peranan penting dalam mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bersekolah di perguruan formal memiliki persyaratan akademis dan keuangan yang tidak kecil. Banyak orang tua pribumi yang masuk dalam golongan “mampu”, bersedia mengorbankan segalanya demi pendidikan anak-anak mereka. Sebagian dari mereka harus rela

mengirimkan anak mereka tinggal di tempat lain. Sekolah-sekolah lanjutan hanya terbatas di beberapa kota besar di Jawa saja. Jadi mau tak mau, bagi siswa dari kota kecil di Jawa dan luar Jawa harus pergi ke kota-kota besar di Jawa yang saat itu hanya bisa ditempuh melalui jalan darat atau dengan kapal laut yang memakan waktu.

Untuk menempuh pendidikan tinggi para pemuda Indonesia bahkan harus pergi ke Belanda atau negara Eropa lainnya. Di Hindia Belanda pada saat itu belum ada satupun perguruan tinggi. Belajar di Belanda dan Eropa memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya sekolah di perguruan tinggi di Belanda selama setahun pada awal abad ke-20 sedikitnya adalah f770,00, dengan rincian f480 untuk sewa kamar berikut makan dan cuci, f220 untuk buku dan ongkos belajar empat jam pelajaran perminggu, dan f70 untuk pakaian. Apabila kuliah dapat diselesaikan dalam 5 tahun, maka biaya yang diperlukan sekitar f3.850,00. Belum lagi kalau ditambah biaya rekreasi, kesehatan dan ongkos kapal laut pulang-pergi. Angkanya bisa membengkak menjadi f5.000,00 - f6.000,00. Jumlah tersebut terhitung sangat besar. Apalagi bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang hanya f161 per tahun. Tidak mengherankan jika pada masa itu hanya anak bupati atau sultan saja yang dapat berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan tinggi.

Memang ada pendidikan tinggi yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah yaitu Akademi Militer Kerajaan (Koningklijk Militair Academie, KMA) di Breda. Perguruan tinggi ini menghasilkan para perwira militer baik yang akan ditempatkan di Belanda maupun di Hindia Belanda. Tiap tahun, satu orang Indonesia diterima di perguruan tinggi ini. Beberapa

orang lulusannya kemudian memegang peranan penting dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Tujuh orang dari mereka menghadap Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifoeddin untuk menyampaikan gagasan pembentukan TNI.

Gagasan mendirikan perguruan tinggi di Hindia Belanda mulai timbul pada tahun 1910. Saat itu ada komisi yang bermaksud mengubah sekolah-sekolah kejuruan menjadi universitas. Gagasan itu tidak segera dapat diwujudkan. Eropa dilanda peperangan besar. Perang yang dikenal dengan nama Perang Dunia Pertama berkecamuk pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Selama perang hubungan antara Hindia Belanda dan Belanda dapat dikatakan putus. Jalur pelayaran dari Hindia Belanda ke Belanda dan sebaliknya terganggu. Belanda diserang Jerman. Kota-kotanya dijatuhi bom. Suasana perang di Eropa sangat berpengaruh kepada situasi sosial politik di Hindia Belanda. Hal yang sangat dirasakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi untuk mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Selepas Perang Dunia Pertama, di Belanda dibentuk sebuah komisi yang beranggota Dr. Abdoel Rivai, Bavinck, Bruins, G. A. Hazeu, Kohnstamm, N.J. Krom, Lumentut, Tehupeiory, van Vollenhoven, dan Vinkesteyn. Komisi yang didalamnya terdapat 3 orang bangsa Indonesia itu bertugas membuat sebuah rancangan mengenai pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda.

Di luar komisi itu, sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Koninklijk Instituut voor Hooge Technisch Onderwijs in Nederlandsch Indië melakukan usaha terobosan dengan mendirikan lembaga pendidikan teknik tinggi dengan nama Technische Hoogeschool di Bandung pada tahun 1920. Pada

tahun 1924, Pemerintah Hindia-Belanda atas saran komisi membuka Rechtskundige Hoogeschool (RHS, sekolah hakim tinggi) yang menerima lulusan AMS dan HBS dengan lama pendidikan 5 tahun. Sekolah hakim tinggi yang didirikan di Batavia ini merupakan peningkatan dari Rechts School (Sekolah Hakim) yang menerima lulusan ELS dengan lama belajar 3 tahun. Pada tahun 1924 pengelolaan Technische Hoogeschool di Bandung yang semula berada di tangan swasta diambil alih Pemerintah Hindia Belanda (*50 Tahun Pendidikan di Indonesia*, 1995 :33).

Sementara itu, walaupun STOVIA atau biasa disebut Sekolah Dokter Jawa sudah berdiri sejak 1851, tetapi pendidikan tinggi kedokteran baru berdiri pada tahun 1927 yaitu dengan didirikannya Geneskundige Hoogeschool (Sekolah Kedokteran Tinggi, GHS). Sekolah dengan lama belajar enam tahun ini menerima lulusan AMS dan HBS (*50 Tahun Pendidikan di Indonesia*, 1995 :33).

1.2 Munculnya Kelompok Mahasiswa

PENDIRIAN perguruan tinggi di Hindia-Belanda memunculkan kelompok baru yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang belajar di tanah air sendiri. Kelompok ini dari segi hukum dan sosiologis dapat dibedakan dengan kelompok siswa sekolah menengah. Secara hukum, mengingat usia mereka sudah dewasa, mahasiswa boleh terjun ke dalam politik praktis. Sementara siswa sekolah menengah yang usianya rata-rata dibawah 18 tahun tidak diperkenankan terjun ke dalam politik praktis. Secara sosiologis, mahasiswa, yang jumlahnya sangat

sedikit itu, umumnya datang dari keluarga “yang lebih berada” dibandingkan siswa sekolah menengah.

Ketika tahun pertama Sekolah Teknik Tinggi dimulai pada tahun 1920/1921 jumlah mahasiswa yang diterima adalah 28 orang, 22 orang Belanda, 4 orang Cina, dan 2 orang Indonesia. Tahun 1921/1922 jumlah mahasiswa Indonesia berjumlah 4 orang, jumlah mahasiswa Eropa 29 orang. Sejak tahun 1926/1927 jumlah mahasiswa pribumi selalu melebihi jumlah mahasiswa golongan lain. Sampai dengan tahun 1939/1940 jumlah mahasiswa secara keseluruhan sejak dibukanya perguruan tinggi tersebut adalah 3.242 orang, 1.489 (45%) orang Indonesia, 1.012 (32%) dari golongan Eropa, dan 741 (23%) orang Cina (Notosusanto, 1990 : 133).

Pada tahun 1925 untuk pertama kalinya 4 orang Indonesia diwisuda sebagai sarjana teknik. Mereka adalah sarjana pertama kali lulusan perguruan tinggi dalam negeri (Hindia Belanda). Sampai dengan kedatangan Jepang jumlah sarjana bangsa Indonesia lulusan perguruan tinggi dalam negeri adalah 230 orang atau 15,44% dari seluruh mahasiswa Indonesia atau 7,09% dari total mahasiswa. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 70 juta jiwa dan 2 juta diantaranya pernah mengenyam pendidikan rendah. Artinya terdapat 1 orang sarjana diantara 304.347 penduduk Indonesia (Notosusanto, 1990 : 134).

1.3 Mahasiswa dan Nasionalisme

PARA pemuda Indonesia yang memasuki perguruan tinggi pada tahun 1920-an banyak diantaranya adalah aktivis organisasi pemuda kedaerahan. Soekarno yang masuk sekolah

teknik tinggi di Bandung pada tahun 1921 adalah anggota JJ cabang Surabaya. Soekarno juga mempunyai hubungan yang erat dengan Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang tokoh Sarekat Islam. Selain Soekarno terdapat pula Abdoelah Sigit, Soegondo Djojopuspito, Oesman Sastroamidjojo dari Jong Java. Dari Jong Sumatranen Bond ada Muhammad Yamin, Aboe Hanifah, Amir Sjarifoeddin.

Setelah menjadi mahasiswa, sebagian besar dari mereka meneruskan aktivitasnya dalam organisasi pergerakan. sebagian dari mahasiswa itu bahkan kemudian bergabung dalam partai-partai politik. Partisipasi dalam politik ini dimungkinkan mengingat para mahasiswa umumnya berusia diatas delapan belas tahun, batas minimal menurut hukum untuk turut berpolitik. Bahkan ada mahasiswa yang mendirikan partai politik seperti yang dilakukan Soekarno dan Anwari.

Partisipasi mahasiswa dalam politik ini selain karena para mahasiswa umumnya sudah punya pengalaman politik dengan menjadi anggota dan pengurus organisasi pemuda kedaerahan, juga didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kota-kota besar tempat berdirinya perguruan tinggi di Hindia Belanda adalah pusat-pusat pergerakan nasional. Di kota-kota tersebut tinggal tokoh-tokoh kawakan pergerakan nasional seperti Agus Salim di Batavia, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo di Bandung, Dr. Soetomo dan HOS Tjokroaminoto di Surabaya. Tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan para mahasiswa dan bahkan menjadi tempat bertanya para mahasiswa.

Kedua, pengaruh lingkungan pendidikan. Lingkungan perguruan tinggi sangat berbeda dengan lingkungan sekolah menengah. Pengajar di perguruan tinggi adalah para guru besar yang tidak selamanya mempunyai pandangan politik yang

sejalan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Para guru besar itu mempunyai pandangan politik yang beragam. Salah satu pemikiran guru besar yang berpengaruh dalam alam pikiran mahasiswanya adalah Prof. Baars dari THS Bandung. Prof. Baars adalah guru besar berhaluan kiri dalam pandangan politik. Ia banyak menentang kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pandangan politik para guru besar ini langsung maupun tidak langsung mempengaruhi alam pikiran mahasiswanya.

Ketiga, sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang mempergunakan bahasa pengantar bahasa asing, Inggris dan Perancis, disamping bahasa Belanda yang saat itu merupakan bahasa resmi memungkinkan para mahasiswa untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Pengetahuan akan kondisi itu membentuk sebuah pola terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Lambat laun terbentuklah kelompok-kelompok diskusi diantara para mahasiswa tersebut yang membicarakan perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Kegiatan diskusi dalam kelompok itu adalah salah satu contoh pengaruh lingkungan pergaulan di masyarakat yang membentuk pandangan politik para mahasiswa.

Pada tahun 1923, kelompok-kelompok diskusi semakin berkembang dengan pulangnya para mahasiswa Indonesia dari Belanda. Para alumni Belanda yang tinggal di tiga kota besar di Jawa, Batavia, Bandung, dan Surabaya kemudian memunculkan kelompok-kelompok studi yang anggotanya tidak terbatas pada kalangan mahasiswa, tetapi meliputi juga para sarjana. Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studieclub) merupakan kelompok studi pertama, didirikan di Surabaya pada 11 Juli 1924. Pendiri dan penggerak utamanya

adalah Dr. Soetomo, pendiri Budi Utomo dan mantan Ketua Indonesische Vereeniging pada 1919-1923. Soetomo menginginkan kelompok studi tersebut dapat menyatukan kaum terpelajar Jawa, mengembangkan kesadaran mereka tentang Indonesia sebagai suatu bangsa dan memberikan pimpinan kepada gerakan kebangsaan. Pada awalnya, anggotanya adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia, tetapi kemudian beranggota mahasiswa di Batavia dan Bandung.

Di samping berjuang untuk persatuan dalam bidang politik, anggota-anggota PPPI tetap rajin belajar untuk mendapatkan ilmu yang sangat diperlukan dalam perjuangan. Para pemuda yang tergabung dalam beberapa organisasi-organisasi pemuda merasa yakin bahwa organisasi yang mereka anggotai adalah tempat untuk mendidik para pemuda untuk menjadi pemimpin di kelak kemudian hari. Tokoh PPPI, Sumitro Reksodiputro menandakan bahwa PPPI mendidik para pemuda yang tergabung dalam perhimpunannya untuk mengobarkan semangat gerakan Pemuda dengan mengusahakan persatuan di kalangan Pemuda.

Di dalam dunia kemahasiswaan kita dapat membagi tiga kelompok mahasiswa berdasarkan orientasi kegiatannya selama kuliah. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang mengisi waktu luangnya hanya dengan belajar. Kelompok kedua adalah mahasiswa yang mengisi waktu luangnya dengan berhura-hura. Kelompok ketiga adalah mahasiswa yang mengisi waktu luangnya dengan kegiatan politik. Kelompok mahasiswa yang terakhir ini adalah kelompok yang peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

1.4 Pengaruh Media Massa

SALAH satu faktor yang mendorong tumbuhnya pergerakan mahasiswa adalah media massa. Pada akhir abad ke-19 di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda) mulai tampak ada penerbitan pers yang bercorak dan berdasar pada suatu program politik. Karangan yang disajikan bersikap kritis terhadap politik kolonial Belanda di Hindia Belanda. Muncullah majalah yang dikenal dengan nama *Bondsblad*, terbit 1897. Majalah ini membawa suara Indische Bond, perkumpulan kaum Indo-Belanda, yang memperjuangkan Hindia Belanda sebagai tanah airnya serta mengusahakan perlakuan yang sama bagi mereka dalam bidang politik. Selain *Bondsblad*, terbit juga *Jong Indie*, yang didirikan oleh Mr. Th. Thomas, seorang ahli hukum di Batavia.

Pada awal abad 20, muncul organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Mereka butuh corong untuk menyampaikan program organisasinya. Boedi Oetomo menerbitkan Majalah *Retno Doemilah* dalam bahasa Melayu Jawa, dan *Soeara Goeroe*. Tahun 1907 di Bandung terbit Majalah *Medan Prijaji* yang dipimpin R.M. Tirtoadisoerjo, yang sebelumnya menerbitkan Majalah *Soenda Berita*.

Di masa-masa itulah terbit banyak majalah, yang kebanyakan isunya mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhir 1910, Douwes Dekker menerbitkan majalah dwi mingguan *Het Tijdschrift* yang sangat radikal pembahasannya politiknya dengan menyerukan aksi melawan kolonial. Pada tahun 1913, giliran Tjipto Mangoenkoesoemo menerbitkan Majalah *De Indier*.

R.M. Soewardi Soerjaningrat mendirikan *Hindia Poetra*, memakai bahasa pengantar Belanda. Majalah ini berubah menjadi *Indonesia Merdeka*, yang kemudian terbit dalam dua

bahasa. Peredarannya sangat luas, hingga ke Jerman, India, Mesir, Malaya, dan Prancis. Pembacanya mulai dari guru, kalangan swasta, mahasiswa, pejabat Belanda dan Indonesia, redaksi surat kabar, dan sebagainya.

Balai Poestaka, salah satu penerbit tertua, juga menerbitkan beberapa majalah untuk rakyat, antara lain *Pandji Poestaka*, *Kedjawen*, dan *Parahijangan*, majalah anak-anak berbahasa Melayu *Taman Kanak-Kanak*, dan yang berbahasa Jawa *Taman Botjah*. Majalah-majalah lain yang terbit dalam kurun ini antara lain *Fikiran Rakjat* milik Partai Nasional Indonesia (PNI), dan *Daulat Rakjat* (diterbitkan Bung Hatta). Lalu, muncul pula Majalah *Weekblad Sin Po* tahun 1923 yang merupakan terbitan grup Sin Po. Di majalah mingguan ini pula naskah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman untuk pertama kalinya dimunculkan.

Tercatat, hingga tahun 1920-an, sudah ada 127 majalah dan surat kabar. Setelah era ini, masih ada lagi majalah tri wulanan *De Chineesche Revue* (1927), *Timboel* (membahas soal budaya, tahun 1930-an), hingga *Pedoman Masyarakat* yang terbit di Medan (diasuh HAMKA), serta *Pandji Islam*.

1.5 Pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

DI penghujung tahun 1925, sekelompok mahasiswa *Rechtshoogeschool* (RHS, Sekolah Hakim Tinggi) dan siswa kelas atas *School tot Opleiding van Inlandsch Artsen* (Stovia, Sekolah Dokter Bumiputera) mengadakan diskusi di Gang Rijkman dan Fromberg Park, Weltevreden. Mahasiswa yang sering hadir dalam diskusi tersebut adalah Soewirjo, Oesman Sastroamidjojo, Moeksinoen, Sigit, Goelarso, Darwis,

Soerjono, Soesalit, dan Soegondo (*45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1974 : 211).

Dalam pembicaraan yang diadakan secara informal tersebut, mereka berkesimpulan bahwa mereka tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga harus ikut memikirkan soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dari diskusi-diskusi tersebut timbulah gagasan untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (*45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1974 : 211).

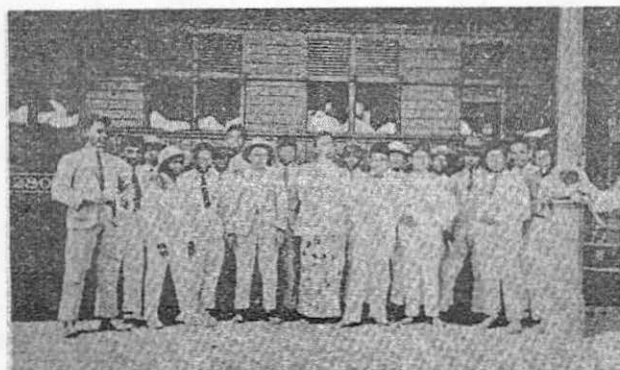
Hasil pertemuan pendahuluan ini kemudian dilanjutkan di Yogyakarta dengan memanfaatkan Kongres Jong Islamieten Bond yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 Desember 1925. Kongres dihadiri undangan yang mencapai 47 macam organisasi pergerakan di Indonesia. Kongres juga dihadiri tokoh-tokoh antara lain Dwidjosewojo dari Budi Utomo, H. Fachrudin, Ki Hadjar Dewantara, Dr. Satiman Wiriosandjojo, Gondoatmodjo, Surjopranoto, dan H.O.S. Tjokroaminoto.

Setelah kongres JIB, para mahasiswa itu kemudian bertemu lagi di Bandung dengan memanfaatkan Kongres Jong Java Kedelapan, 28 Desember 1925 - 2 Januari 1926. Kongres ini banyak membahas persoalan politik yang sedang terjadi.

Pada kongres Jong Java tersebut, para mahasiswa terpengaruh pendapat Tabrani, seorang jurnalis Surat Kabar *Hindia Baroe*, yang sejak 1916 aktif di Jong Java. Ia mengemukakan perlunya persatuan bagi segenap rakyat yang ada di Hindia Belanda. Persatuan itu bukannya suatu hal tidak mungkin tercapai jika perasaan kesadaran akan keberadaan dirinya dalam lingkup terjajah telah muncul, sebagaimana ia katakan :

“Rakyat Hindia Belanda merasa bahwa bangsa Jawa, Sumatera, Ambon, Manado, Sunda, dan sebagainya sebetulnya diperintah oleh pemerintahan yang satu, yang

kelak oleh kita sendiri akan digantinya. Pemimpin Jawa diwajibkan memperbaiki keadaan di Jawa, pemimpin Sumatera diwajibkan meningkatkan derajat tanah Sumatera, begitu juga pemimpin – pemimpin lainnya harus senantiasa cari akal supaya familinya, kampungnya, dan



Utusan Bandung sedang berpose di stasiun Gambir untuk menghadiri rapat umum PPPI di Batavia

pulaunya masing-masing harus dijaga jangan sampai menimbulkan perselisihan diantara anak-anak Hindia yang ada dan kebencian yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh sama sekali dibawa ke medan pergerakan.”

Setelah melewati beberapa pertemuan, seperti yang disebutkan di atas, akhirnya gagasan untuk membentuk perhimpunan mahasiswa terwujud pada September 1926. Perhimpunan mahasiswa yang baru didirikan diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia disingkat PPPI atau De Indonesische Studenten Unie (*Wilopo 70 Tahun*, 1979 : 308). Abdoellah Sigit, seorang mahasiswa RHS, terpilih sebagai

ketua. Saat itu, usulan menggunakan istilah mahasiswa seperti yang diusulkan Muhammad Yamin belum diterima secara umum mengingat istilah mahasiswa dianggap sesuatu yang terlalu tinggi.

Keanggotaan PPPI terbatas pada kalangan mahasiswa, selain mahasiswa tidak dapat diterima menjadi anggota. Mahasiswa-mahasiswa itu berasal dari Sekolah Hakim Tinggi (RHS), Sekolah Teknik Tinggi (THS), dan siswa kelas-kelas tertinggi STOVIA (kelas 7-10). Sesudah dibukanya Sekolah Kedokteran Tinggi (GHS) pada tahun 1927, keanggotaannya bertambah dengan mahasiswa GHS. Cabang-cabang PPPI hanya terdapat di kota-kota yang mempunyai perguruan tinggi yaitu Batavia, Bandung, dan Surabaya. Pada tiap-tiap sekolah tersebut didirikan cabang PPPI. Menurut R. Katjasungkana (*Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, 1978 : 365), Sigit yang menempuh pendidikan AMS-nya di Bandung menemui sendiri mahasiswa di Bandung untuk mendirikan cabang PPPI di Bandung.

Karena keanggotaannya terbatas pada kalangan mahasiswa, anggota PPPI merupakan klub kecil dengan anggota sekitar 30 orang. Kebanyakan anggota berasal dari perhimpunan-perhimpunan pelajar kesukuan, dan sering kali juga masih aktif dalam perhimpunan-perhimpunan tersebut, misalnya seperti Goelarso, Abdoellah Sigit, dan Koentjoro (Jong Java), Aboe Hanifah dan Yamin (Jong Sumatranen Bond), dan Amir Sjarifoeddin (Jong Bataks Bond).

Bab 2

Kongres Pemuda dan Gagasan Fusi PPPI

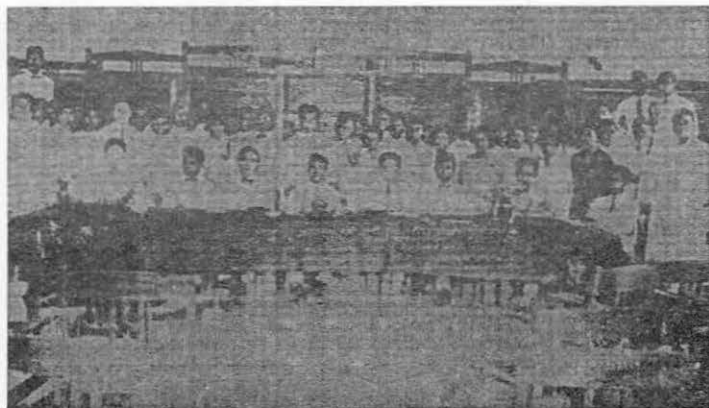
2.1 Kongres Pemuda Pertama

MENJELANG tahun 1926, gambaran umum bahwa perhimpunan pemuda itu hanya memfokuskan diri kepada kegiatan pendidikan, kepanduan, kebudayaan, dan olah raga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Timbulnya kesadaran akan persoalan yang dihadapi kalangan pergerakan, mendorong para pemuda untuk memberikan sesuatu yang bermakna bagi kaum pergerakan. Aksi yang jelas dari usaha para pemuda pergerakan adalah dengan menggelar kegiatan Kongres Pemuda Pertama.

Kongres Pemuda Pertama atau Eerste Indonesisch Jeugdcongres diselenggarakan pada tanggal 30 April – 2 Mei

1926. Kongres itu dihadiri berbagai organisasi pemuda, wakil partai politik, dan wakil Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari Patih Batavia, polisi, Politieke Inlichtingen Dienst (PID), dan Adviseur voor Inlandsch Zaken (Penasehat Urusan Bumiputra).

Mohammad Tabrani selaku ketua kongres, dalam pembukaan pidatonya mengobarkan semangat persatuan nasional dan menghindari segala sesuatu yang dapat menceraiberaikan pemuda. Panitia memilih acara-acara yang mengandung unsur-unsur pemersatu dan menjauhkan diri dari



Suasana Kongres Pemuda Pertama Tahun 1926

benih-benih perpecahan. Pernyataan yang disampaikan Tabrani itu tampaknya dimaksudkan untuk menggugah rakyat yang ada di Hindia Belanda agar memupuk rasa persatuan. Pemikiran ini menjadi dasar dari pemikiran utusan Jong Java Cabang Batavia di mana Tabrani menjadi bagiannya. Dalam pidatonya tersebut, Tabrani juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pembicara di kongres dan semua pihak yang membantu terselenggaranya kongres tersebut.

Setelah pembukaan, rapat kongres kemudian ditunda selama 15 menit untuk istirahat. Rapat dilanjutkan dengan menampilkan Soemarto, wakil Ketua Kongres, sebagai penceramah. Soemarto menyampaikan ceramah dengan judul *Gagasan Persatuan Indonesia*. Dalam pidatonya, Soemarto mengutip tulisan R. M. Notosuroto dalam majalah *Oedaja* yang mengatakan bahwa pembentukan kesatuan Indonesia sangat mungkin karena :

1. Bangsa Indonesia sama-sama dijajah Belanda
2. Indonesia merupakan satu kesatuan budaya
3. Dilihat dari sudut bahasa, Indonesia adalah suatu kesatuan

Tentang organisasi pemuda, Soemarto mengusulkan agar dibentuk sebuah perkumpulan yang dapat menampung seluruh elemen pergerakan pemuda yang ada.

Pembicara terakhir adalah R. T. Djaksodipoero, materi yang dibicarakan adalah tentang talak dalam pernikahan. Pada intinya R.T. Djaksodipoero mengajak para peserta kongres untuk mencermati dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan kaum wanita yang seringkali dirugikan dalam proses perceraian.

Muhammad Yamin menyampaikan pidato berjudul *Kemungkinan Perkembangan Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang*. Muhammad Yamin menyampaikan uraian tentang kemungkinan-kemungkinan masa depan bahasa Indonesia dan kesusasteraannya. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah lain seperti Sunda, Aceh, Bugis, Minangkabau, Madura, dan lain-lain, Muhammad Yamin berpendapat bahwa hanya ada dua yang mempunyai peluang untuk dijadikan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Jawa

dan bahasa Melayu. Bahasa Jawa mempunyai peluang menjadi bahasa persatuan karena bahasa Jawa adalah bahasa dengan jumlah penutur terbanyak. Bahasa Melayu mempunyai peluang menjadi bahasa persatuan karena saat itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*). Muhammad Yamin berkesimpulan bahwa peluang bahasa Melayu untuk menjadi bahasa persatuan lebih besar daripada bahasa Jawa.

Pada saat Kongres Pemuda Pertama, terlihat ada perbedaan yang cukup besar antara siswa-siswa sekolah menengah dan para mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa lebih menekankan segi politik. Hal ini tidak mengherankan karena para siswa sekolah menengah pada zaman itu kurang mendapat pelajaran-pelajaran yang bisa menggugah pemikiran mereka untuk mengerti seluk beluk politik. Hal ini dengan sendirinya berbeda dengan para mahasiswa.

Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengetahui perkembangan politik, baik nasional maupun internasional. Hal-hal yang mempengaruhi pemikiran pada mahasiswa adalah kemenangan Jepang atas Rusia 1905, Revolusi Cina 1911, 14 pasal Woodrow Wilson yang memberi harapan terhadap bangsa-bangsa terjajah, untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang saat itu dijajah Belanda.

Walaupun pada saat Kongres Pemuda Pertama digelar, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia belum resmi terbentuk, namun gagasannya tentang persatuan di kalangan pemuda pergerakan sudah menggema dalam kongres tersebut. Gagasan tersebut disampaikan oleh tokoh-tokoh yang pada empat bulan kemudian setelah Kongres Pemuda Pertama usai, tepatnya di bulan September 1926 mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sayangnya, dalam Kongres Pemuda Pertama usaha mempersatukan perhimpunan pemuda belum berhasil

2.2 PPPI dan Kongres Pemuda Kedua

DALAM Kongres Pemuda Pertama usaha mempersatukan perhimpunan pemuda tidak berhasil. Hingga melewati tahun 1927, usaha untuk membentuk “Badan Kontak” antar organisasi pemuda mengalami kegagalan. Karena terus mengalami kebuntuan, akhirnya Jong Java kehilangan peran dominannya dalam gerakan pemuda. Peran itu berusaha diambil alih oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dengan mengefektifkan para anggotanya yang merangkap menjadi anggota pengurus perhimpunan pemuda kedaerahan. Mereka membawa ide-ide persatuan ke dalam organisasi pemuda tersebut sehingga pada Kongres Pemuda Kedua ide-ide persatuan itu sudah mulai matang.

PPPI yang merupakan pengggagas fusi mengundang berbagai organisasi pemuda pada 3 Mei 1928 untuk mengadakan pertemuan di Indonesische Clubgebouw. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penyelenggaraan Kerapatan Besar Pemuda Indonesia. Dalam pertemuan itu disepakati panitia pelaksana Kerapatan Besar.

Minggu, 12 Agustus 1928 di gedung Indonesische Clubgebouw, Kramat 106, Weltevreden, tampak lebih ramai dari biasanya. Gedung itu kedatangan utusan Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, dan Pemuda Kaum Betawi. Bertindak selaku tuan rumah adalah Soegondo Djojopuspito, mahasiswa Rechtschool (RHS, Sekolah Tinggi Hukum), Batavia. Mereka berkumpul untuk membahas

penyelenggaraan Kerapatan Besar Pemuda Indonesia, kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Kedua.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan dilaksanakan selama dua malam satu hari pada bulan Oktober 1928.

Untuk itu, disusunlah panitia pelaksana kongres yang diketuai oleh Soegondo Djojopoespito, Ketua PPPI. Yamin yang menjabat ketua Jong Sumatranen Bond terpilih sebagai sekretaris kongres. Mereka dibantu oleh R. M. Djoko Marsaid (wakil dari Jong Java), Amir Sjarifoeddin (wakil dari Jong Bataks Bond), Djohan Mohammad Tjai (wakil dari Jong Islamieten Bond), R. Katjasoengkana (wakil dari Pemuda Indonesia), R. C. L. Senduk (wakil dari Jong Celebes), Johannes Leimena (wakil dari Jong Ambon), dan Mohamad Rochjani Soe' oed (wakil dari Pemoeda Kaoem Betawi).

Tentang peranan PPPI dalam Kongres Pemuda Kedua, Adviseur voor Inlandsch Zaken, menulis, "De PPPI had de leiding; haar voorzitter Soegondo was teven voorzitter van het congres-comite"

PPPI merupakan tenaga penggerak yang ada di belakang Kongres Pemuda Kedua, 27-28 Oktober 1928. Jabatan-jabatan penting dalam panitia Kongres dipegang oleh tokoh-tokoh PPPI Soegondo Djojopuspito (ketua), Muhammad Yamin (sekretaris), dan Amir Sjarifudin (Bendahara).

Tema dari kongres terutama diarahkan kepada soal fusi atau persatuan Pemuda seluruhnya dan kemungkinan dileburnya perkumpulan-perkumpulan Pemuda pelajar yang berasal dari daerah-daerah. Sekalipun ide persatuan telah mulai populer diantara Pemuda-Pemuda pelajar, tapi masih juga banyak perdebatan yang sengit. Kembali dapat didengar kecurigaan dan kecemasan akan dikuasi oleh mayoritas yang

besar. Akan tetapi, walau suara ini amat nyaring sekali, tidaklah terdapat pada mayoritas para hadirin. Perombakan perkumpulan-perkumpulan Pemuda pelajar daerah tidak dikerjakan pada waktu itu juga, ke Kongres perkumpulan mereka masing-masing.

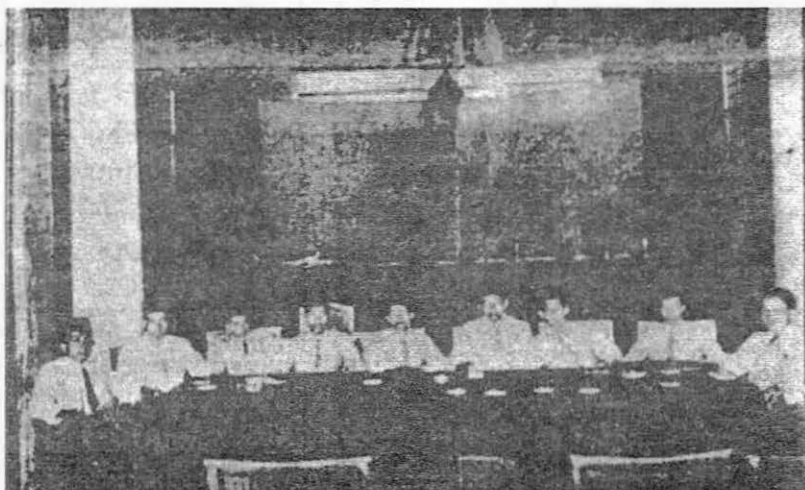
Sidang pada hari-hari kongres itu ramai dihadiri Pemuda. Banyak diantara mereka mengenakan pakaian "palmbeach yang licin disetrika" dilengkapi dengan topikhas "Indonesia", yaitu peci yang sudah menjadi tutup kepala nasional yang baru. Semula peci merupakan topi untuk sholat, terutama banyak dipakai oleh orang Minangkabau dan Melayu, tetapi pada pertengahan tahun dua puluhan oleh para pelajar Hindia di Negeri Belanda diangkat menjadi lambang identitas Indonesia. Karena peci merupakan barang langka di Negeri Belanda, sebagian pelajar membuat sendiri peci tersebut dari topi Eropa dengan menggunting pinggirannya,

Ketika sidang pembukaan kongres, para utusan dari berbagai perhimpunan menyatakan rasa simpatinya kepada panitia. Polisi kolonial juga mengawasi dengan ketat setiap gerak-gerik dan pembicaraan peserta kongres, termasuk ketika musik lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan menggunakan biola yang digesek Wage Rudolf Supratman.

Dalam Kongres Pemuda Kedua gagasan fusi masih terus diusahakan oleh tokoh-tokoh PPPI yang ada di Jong Java, dan Jong Sumatranen Bond serta organisasi Jong Indonesia. Setelah melalui beberapa kali pertemuan diantara tiga organisasi tersebut, gagasan fusi sungguh menjadi kenyataan. Pada tanggal 28 Desember 1930 – 2 Januari 1931 telah disepakati menyelenggarakan Kongres Pertama Indonesia Muda.

Hasil dari Kongres Pemuda Kedua dicapai kesepakatan kata untuk pengakuan yang bulat, bahwa semua golongan yang turut serta akan bersatu dalam satu perkumpulan Pemuda yang baru, yang akan merupakan fusi dari segala perkumpulan pelajar daerah. Maka lahirlah satu Sumpah Pemuda, yang menyatakan bahwa Pemuda Indonesia.

Mempunyai satu tanah air, Indonesia
Satu Bangsa, Bangsa Indonesia
Satu Bahasa, Bahasa Indonesia



Kongres dipimpin oleh sebuah panitia yang terdiri dari R. Katjasoengkana, Rochjani Soe'oad, Amir Sjarifuddin, Moehammad Jamin, Soegondo Djojopuspito (ketua), Djoko Marsaid, Djohan Mohamad Tjai, Antapermana, dan R.C.L. Senduk. Ketua, sekretaris, dan Bendahara berasal dari PPPI

Dengan demikian terciptalah cita-cita PPPI yaitu Indonesia bersatu. Hasil perjuangan PPPI dalam Kongres Pemuda Kedua adalah disetujuinya usul fusi dengan suara 5 setuju dibanding 2 yang menolak. Golongan yang tidak setuju berpendapat bahwa fusi akan memperlemah semangat perjuangan karena bergabung dengan organisasi yang moderat. Saat rapat masih berlangsung datang telegram dari PB Jong Java yang mengatakan bahwa Jong Java akan ikut dalam fusi (Pringgogidgo, 1994 : 117).

Hal yang menarik lainnya adalah dengan kedatangan Mohammad Amir, mantan pemimpin Jong Sumatranen Bond yang sudah kembali ke Indonesia sesudah beberapa tahun tinggal di Negeri Belanda. Ia menghadiri kongres atas nama klub Pemuda teosofi "Orde Der Dianaren van Indie". Pemikiran para teosof itu tidak sejalan dengan kaum nasionalis radikal, karena dalam cita-cita asosiasinya mereka terlalu bersandar pada orang Belanda, karena itu di Negeri Belanda Amir sempat mengalami konflik terbuka dengan mantan rekan klubnya, Hatta. Tetapi di saat menghadiri kongres Amir meyakinkan para peserta bahwa para teosof Hindia bersedia bergabung dengan Pemuda nasionalis

Seusai Kongres Pemuda Kedua, PPPI mengurangi perannya dalam pergerakan pemuda dengan tidak melibatkan diri secara resmi dalam kegiatan pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda. Anggota PPPI yang terlibat pada saat itu mengatasnamakan perseorangan atau perhimpunan asal yang masih bersifat kedaerahan. Koentjoro Poerbopranoto, Djaksodipoera, Soediman Kartohadiprodjo lebih mengatasnamakan Jong Java dari pada PPPI, demikian juga dengan Muhammad Yamin, Mohammad Tamzil, AK Gani yang lebih mengatasnamakan Jong Sumatra. Dalam Jajaran

pengurus Komisi Besar Indonesia Muda PPPI tidak menempatkan wakil secara resmi.

2.3 Gagasan Fusi PPPI

JASA PPPI terhadap pergerakan nasional terutama terletak dalam usaha-usahanya yang dapat mempersatukan perkumpulan-perkumpulan Pemuda berdasarkan kedaerahan, sehingga setelah Kongres Pemuda Kedua dapat dilahirkan Indonesia Muda. Hal ini dimungkinkan karena beberapa pemimpin PPPI menjadi pemimpin perkumpulan pemuda pelajar kedaerahan (Budaja Djaja, No. 4, Tahun 1971).

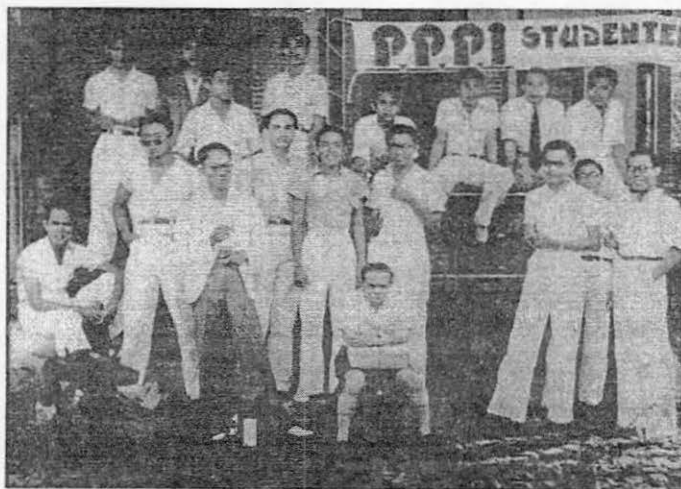
PPPI ingin meniadakan garis pemisah etnik dan agama. Mereka menginginkan fusi menjeluruh. Dengan fusi para Pemuda akan merasa sebagai orang Indonesia sampai ke lubuk hati. Berbeda dengan badan kontak atau federasi yang hanya akan menutupi sementara perbedaan etnis dan agama. Dengan fusi, cita-cita kemerdekaan diharapkan akan selalu berkobar (Miert, 2003: 502).

Tentang persatuan PPPI berpendapat bahwa persatuan Indonesia adalah senyata yang kuat dalam perjuangan melawan Belanda. Selama ini Belanda dengan politik *divide et impera*-nya selalu memecah belah bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tidak dapat melawan Belanda. Untuk itu, semangat kedaerahan dan pertentangan harus dihilangkan. Dalam tahun 1926, PPPI menulis, "Bangsa Indonesia tidak mau dibagi-bagi lagi dan menjerukan untuk menguburkan dengan secepat-cepatnya perasaan Propinsialisme dan mengusahakan dengan

sekuat-kuatnya persatuan bangsa” (45 Tahun Sumpah Pemuda, 1974 : 360).

Awal tahun 1927, PPPI mengusulkan kepada semua perhimpunan Pemuda untuk selekas mungkin melakukan fusi. Nama yang diusulkan untuk fusi adalah Perhimpunan Masa Muda Indonesia. Usul fusi PPPI ini kemudian dimuat dalam Majalah Jong Java No. 23, Tahun 1927. Gagasan ini segera mendapat dukungan Jong Indonesia (Miert, 2003 : 498).

Pada tanggal 23 April 1927, PPPI mengundang perhimpunan Pemuda untuk memusyawarahkan soal fusi.



Perkumpulan Mahasiswa diselenggarakan PPPI di Cimelati, Bogor. Duduk di muka dari kiri ke kanan, Soetjipto dan Ismail. Berdiri dari kiri kanan, barisan depan, Soetjipto, Soekarno, Chairil Anwar, Soetopo (berdasi), Soebiantono, Soenarjo, St. Syah, S. Hadipranoto.

Dalam musyawarah tersebut disepakati dasar-dasar sebagai berikut:

1. Indonesia merdeka harus menjadi ideal Pemuda Indonesia
2. Seluruh perhimpunan Pemuda harus berusaha untuk meleburkan diri (fusi) (*Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, 1978 : 316).

Walaupun perhimpunan tersebut setuju tetapi mereka minta waktu.

Aboe Hanifah, Pemimpin Redaksi Majalah *Indonesia Raja*, menyatakan bahwa PPPI tidak dipengaruhi oleh Sartono dan Soekarno, dua tokoh yang kemudian mendirikan PNI. Ide-ide mereka independen. Pada saat Soekarno akan mendirikan PNI, tokoh-tokoh PPPI diajak bergabung ke dalam kepengurusan PNI. Walau secara perhimpunan PPPI tidak bergabung ke PNI ada beberapa orang anggota secara pribadi bergabung ke dalam PNI diantaranya Soerjadi.

Pada Waktu Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Nazir Dt. Pamoentjak, dan Abdoel Madjid Djojoadingrad ditangkap pada bulan Desember 1927, PPPI menganggap sudah waktunya untuk membicarakan lagi masalah fusi dengan perhimpunan pemuda lain. Perundingan bahkan diadakan beberapa kali, tetapi usaha PPPI belum berhasil. Kalangan pemuda terpecah, ada yang setuju fusi tetapi sebagian lagi setuju federasi. Yang setuju federasi tampaknya terpengaruh badan federasi PPPKI.

Untuk menyatukan langkah dalam perjuangan, pada tanggal 3 Mei 1928, kembali PPPI mengundang pimpinan perhimpunan Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong

Bataks Bond, dan Pemuda Kaum Betawi. Dalam pertemuan tersebut Jong Islamieten Bond menegaskan dukungannya terhadap program fusi namun harus berdasarkan dasar Islam. Hal itu, sesuai dengan pernyataan Kasman atas nama JIB dalam kongres PSII di Batavia bahwa seharusnya orang-orang tidak perlu ragu-ragu untuk mengikuti nasehat H. Agus Salim yang mengusulkan berjuang dalam politik dengan Islam. Sementara itu, Pemuda Sumatra yang berada di bawah pimpinan Mohammad Yamin yang juga anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, mendukung fusi.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 12 Agustus 1928. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di gedung pertemuan PPPI, *Indonesische Clubhuis*, Jalan Kramat 106, Weltevreden (Batavia). Dalam pertemuan tersebut disadari betapa pentingnya pelaksanaan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928 selama satu hari dua malam.

Bab 3

Gedung Kramat 106 dan Kiprah PPPI

3.1 Gedung Kramat 106

PERAN Gedung Kramat 106 sebagai tempat kegiatan pemuda pergerakan diawali pada tahun 1925. Gedung Kramat 106 dijadikan tempat tinggal oleh pelajar yang tergabung dalam Jong Java. Selain sebagai tempat tinggal, gedung tersebut juga menjadi arena diskusi politik dan tempat latihan kesenian Jawa “Langen Siswo”

Pada tahun 1926, penghuni Gedung Kramat 106 mulai beragam, karena tidak hanya dihuni oleh pelajar Jong Java, tetapi juga oleh para pelajar dan mahasiswa dari berbagai suku dan berbagai perguruan tinggi, seperti Amir Sjarifuddin, Mohammad Yamin, Soegondo Djojopoespito, Abu Hanifah, A.K. Gani, Surjadi, F. Lumban Tobing, Kuntjoro, Mokoginta dan lain-lain. Akibat dari keragaman penghuni maka konsep persatuan nasional dijadikan landasan bagi kegiatan diskusi para pelajar dan mahasiswa penghuni gedung tersebut. Selain itu kegiatan para pelajar dan mahasiswa semakin beragam salah satunya kegiatan kepanduan dan olahraga.



Sekretariat PPPI di Gedung Kramat 106 atau Gedung Indonesische Clubgebouw (Gedung Indonesische Clubhuis) sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda.

Di saat semangat nasionalisme menyelimuti hati para mahasiswa di Gedung Kramat 106, timbul gagasan di antara mereka untuk mendirikan perhimpunan pelajar yang mendorong bersatunya seluruh organisasi pergerakan pemuda. Pada bulan September 1926, para mahasiswa yang tinggal di Gedung Kramat 106 secara resmi mengumumkan pendirian Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) sekaligus gedung yang mereka tempati sebagai pusat kegiatan PPPI.

Dengan berdirinya PPPI kegiatan diskusi di kalangan mahasiswa penghuni Gedung Kramat 106 dan tamu undangan semakin sering dan terarah. Dalam diskusi-diskusinya, para mahasiswa sering membicarakan tentang bentuk Negara yang ideal bagi Indonesia merdeka, *poenale sanctie*, dan lain-lain. Untuk itu, mereka memperdebatkan beberapa macam revolusi di dunia seperti Revolusi Amerika 1776, Revolusi Perancis 1789, Revolusi Cina 1911, Revolusi Rusia 1917. Revolusi Perancis pernah berbulan-bulan diperdebatkan. Selain itu kondisi sosial yang penuh dengan tekanan mendorong banyak mahasiswa mempelajari berbagai teori tentang kebebasan dan keadilan sosial seperti pemikiran-pemikiran Sun Yixian, Gandhi, Garibaldi, Plato, Aristoteles, Nicolo Machievelli, Thomas Hobbes, Montesque, Jean Jacques Rousseau. Buku yang sering dibahas dan dianggap terpenting di kalangan mereka adalah buku karya John Stuart Mill. Buku-buku John Stuart Mill, "Representative Government" dan "The Federalist" yang begitu besar berpengaruh terhadap Konstitusi AS. sangat mendapat perhatian para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sebab apa yang terjadi di AS ada persamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Ada hal yang patut dicatat dalam diskusi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu yaitu komentar Bung Karno yang

pernah menghadiri acara diskusi tersebut. Bung Karno berkata, "Sudahlah, tidak perlu banyak teori. Mari kita pikirkan apa yang akan kita perbuat, bagaimana mempersiapkan rakyat kita. Itu lebih baik kita pikirkan sekarang."

Pada permulaan tahun 1928, Gedung Kramat 106 menjadi tempat resmi pertemuan pemuda nasional. Gedung itu



Perjamuan PPPI dalam rangka mendiskusikan permasalahan bangsa bersama Ir. Soekarno, Desember 1930 di Gedung Indonesische Clubgebouw

kemudian diberi nama "Indonesische Clubgebouw" (IC). Papan nama IC mereka pancangkan di muka gedung. Tindakan itu merupakan peristiwa bersejarah, di mana para pemuda telah berani menggunakan nama Indonesia.

Peristiwa terbesar yang pernah diadakan di gedung "Indonesische Clubgebouw" (IC) adalah Kongres Pemuda Kedua tanggal 27-28 Oktober 1928. Setelah Kongres Pemuda Kedua, di gedung "Indonesische Clubgebouw" (IC) diadakan pementasan drama "Ken Arok dan Ken Dedes" yang naskah

dramanya ditulis oleh Mohammad Yamin. Pada tahun 1934 peran gedung “Indonesische Clubgebouw” (IC) berakhir sebagai tempat beraktifitas para mahasiswa pergerakan setelah bubarnya para mahasiswa yang menghuni gedung tersebut.

3.2 Kiprah PPPI di Bidang Pendidikan

PADA umumnya terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan diawali oleh kepedulian mereka terhadap masalah pendidikan. Organisasi Budi Utomo, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dan lain-lain adalah contoh-contoh dari organisasi pergerakan yang diawali dari gagasan untuk membuat studifond, yaitu lembaga yang menghimpun dana belajar bagi kaum bumiputera yang tidak mendapat pemerataan kesempatan belajar dari pemerintah kolonial. Sama seperti organisasi-organisasi pergerakan lainnya, PPPI pun merasa peduli terhadap nasib jutaan kaum bumiputera yang tidak mendapatkan kesempatan belajar. Untuk itu di tengah ketatnya aturan belajar yang sengaja dibuat pemerintah kolonial agar mahasiswa tidak terlibat dalam persoalan masyarakat dan politik, para mahasiswa menyempatkan diri untuk mendiskusikan masalah pendidikan untuk masyarakat

Dalam sebuah rapat umum PPPI, seorang anggota PPPI Moeljadi Dwidjodarmo berbicara tentang pendidikan nasional di Indonesia. Dia memulai dengan tinjauan sejarah panjang mengenai perkembangan pendidikan di negara ini sejak pertengahan abad ke-17 saat kedatangan orang-orang Portugis. Dari sejarah perkembangan pendidikan di negara ini selama kira-kira 3 abad, pembicara menarik kesimpulan bahwa

Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain nampak sangat tertinggal. Pendidikan Belanda pertama baru muncul pada tahun 1897, HIS dibuka tahun 1912 dan beberapa tahun kemudian MULO dan AMS. Menurut Moeljadi pendidikan yang dibuat pemerintah kolonial hanya bersifat mendidik yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial. Kelebihan tenaga terdidik yang tidak tertampung dalam sistem kolonial, sangat ditakuti oleh pemerintah kolonial. Di lain pihak penduduk pribumi membutuhkan kesempatan untuk mendapat pendidikan seluas-luasnya agar mengalami pencerahan. Hal itulah yang memerlukan inisiatif dari para pelajar untuk membangun pendidikan yang mandiri.

Pembicara mengajak peserta rapat untuk memberikan penghargaan sekaligus dukungan kepada sekolah Taman Siswa milik Ki Hajar Dewantara, yang telah berani melawan arus dengan mendirikan lembaga pendidikan tanpa subsidi pemerintah kolonial. Dukungan yang diberikan untuk Taman Siswa adalah dalam bentuk penentangan terhadap undang-undang sekolah liar (*wilden schoolen*) yang melarang Taman Siswa untuk beroperasi. Pembicara mendorong pelajar dan mahasiswa untuk mencurahkan 100% tenaganya bagi kepentingan pendidikan masyarakat, seperti yang telah dilakukan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya. Sebagai penutup sambutannya, pembicara memberikan saran perlunya diadakan kongres pendidikan nasional.

Setelah Moeljadi Dwidjodarmo, pembicara selanjutnya tentang pendidikan adalah Maria Ulfa Santoso. Maria Ulfa memberikan gambaran tentang kondisi di negara-negara Eropa Barat. Dengan adanya kewajiban belajar, perkembangan warga di sana telah mencapai tingkat lulus sekolah dasar. Di Rusia wajib belajar tidak ada. Di negara ini semua pelajar diberi tugas

untuk memberantas buta huruf dengan segala cara. Di Turki masalah pemberantasan buta huruf telah menerima perhatian luar biasa dari Kemal Pasha. Sementara itu di India para pelajarnya aktif beraksi meningkatkan kualitas pendidikan pada masyarakatnya. Bagaimana dengan di negara ini? Pembicara bertanya. Di Surakarta Parindra mengalami perpecahan. Di Buitenzorg, Parindra dan Gerindo telah mengadakan kursus membaca a, b, c. Namun di Batavia nampaknya tertinggal. Pembicara kemudian menjelaskan salah satu hasil Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1935, di mana di antaranya diputuskan bahwa dalam waktu 3 tahun mereka akan mencoba mengajari 5000 wanita Indonesia agar bisa membaca dan menulis. Sehubungan dengan sangat rendahnya tingkat melek huruf di antara orang-orang pribumi, maka pembicara menantang seluruh pelajar untuk melaksanakan program pengenalan membaca bagi pribumi, seperti yang dilakukan pelajar India.

Setelah mendiskusikan masalah pendidikan dalam tiap rapat-rapatnya, maka PPPI merasa perlu untuk segera melakukan tindakan nyata. Aksi-aksi yang dilakukan PPPI dalam bidang pendidikan antara lain:

1. Mengalang dana belajar untuk pelajar pribumi yang potensial namun tidak mampu.
2. Mendirikan sekolah Perguruan Rakyat untuk menyediakan sarana pendidikan bagi kaum pribumi.
3. Menentang undang-undang sekolah liar (*wilden schoolen*).
4. Melaksanakan program pemberantasan buta huruf.

3.2 Kiprah PPPI di Bidang Politik

Sewaktu ketua dipegang oleh Sumitro Reksodiputro PPPI beraktifitas di segala bidang. Dalam bidang politik misalnya PPPI menuntut terwujudnya kemerdekaan penuh, bidang sosial budaya misalnya kegiatan olah raga, ceramah-ceramah, sandiwara dan lain-lain. Disamping itu PPPI mengadakan hubungan timbal balik dan kerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan Pemuda yang lain dan menurut PPPI tidak ada persaingan tidak sehat antar perhimpunan gerakan pemuda.



Resepsi Ulang tahun VIII PPPI. Dewan Pimpinan PPPI siap menerima ucapan selamat para tamu, berfoto bersama di depan Gedung Perguruan Rakyat, Kramat 174 Jakarta, September 1929.

Untuk membuktikan pernyataannya PPPI menunjukkan solidaritasnya dengan mengecam penangkapan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad Hatta, Abdul Madjid Djojoadingrat, Ali Sastroamidjojo dan Nazir Datoek Pamoentjak oleh polisi Den Haag dengan tuduhan makar bekerjasama dengan kaum komunis. Aksi penangkapan itu mendorong PPPI untuk memicu lagi soal fusi di antara perhimpunan-perhimpunan pergerakan pemuda.

Masalah persaingan tidak sehat juga dibantah PPPI dalam kasus hubungannya dengan Indonesia Muda. Beberapa kalangan menganggap PPPI tidak menepati janjinya dengan tidak bergabung dalam Indonesia Muda, padahal PPPI yang mempelopori fusi ke dalam Indonesia Muda. Menurut PPPI tindakannya untuk tetap berdiri di luar Indonesia Muda, bukanlah perpecahan melainkan untuk membagi kekuatan. Secara mendasar PPPI berbeda dengan Indonesia Muda, PPPI menganut asas politik non kooperatif, sedangkan Indonesia Muda, sesuai dengan Anggaran Dasar, tidak akan berpolitik (Miert, 2003:517). Walaupun menganut asas politik non kooperatif, tetapi PPPI tidak menyatakan diri sebagai partai politik, sehingga PPPI berdiri di antara perhimpunan-Pemuda dan partai politik.

Sebagai corong kegiatan politiknya PPPI menerbitkan majalah *Indonesia Raja*. Pemberian judul majalah tersebut lebih dulu dari judul lagu Kebangsaan yang diciptakan Wage Rudolf Supratman. Bagi PPPI, *Indonesia Raja* adalah konsep politik, sama seperti *Serbia Raya*, *Inggris Raya*, dsb.

Dalam setiap sambutan pada acara-acara yang digelar PPPI selalu diungkapkan tujuan perhimpunan itu untuk mencapai Indonesia Merdeka dan usaha untuk mencapai kesatuan Indonesia. Pada setiap rapat tahunan yang diadakan, pengurus

perhimpunan menunjukkan persetujuan bagi usaha menuju kemerdekaan dengan memberikan tembusan yang berjudul "cita-cita yang mulia Indonesia Merdeka". Salah satu contohnya terjadi pada kongres PPPI tanggal 20-23 September 1930 di Batavia. PPPI menetapkan dasar dan arah tujuan dari perhimpunannya yaitu:

"memperoleh Indonesia Merdeka adalah kewajiban yang terluhur buat anak negeri Indonesia, dalam mengejar cita-cita Suci tadi persatuan harus selalu diutamakan, insaf menjadi tiang masyarakat Indonesia, masing-masing anggota (menurut keyakinan dan kecakapannya sendiri-sendiri) mewajibkan diri bekerja dengan sesungguhnya, berbakti pada dan membela Bangsa dan Tanah Air."

Semboyan kemerdekaan selalu dikaitkan dengan setiap aksi PPPI salah satunya aksi menentang pendirian patung Jenderal van Heutzs. Pada tanggal 12 Agustus 1932, PPPI mengadakan rapat umum memprotes upacara pendirian patung peringatan untuk Jenderal van Heutzs. Dalam rapat itu disetujui satu mosi untuk mempersilahkan semua perhimpunan Indonesia dan pers Indonesia memberitahukan kepada rakyat seluruhnya, bahwa pendirian patung van Heutzs itu merupakan pendorong untuk memperkuat persatuan Indonesia untuk memperoleh Indonesia merdeka (Pringgodigdo, 1994 : 213).1932

Selain cita-cita kemerdekaan ada hal-hal yang masih ditolerir untuk diperjuangkan walaupun tuntutan bersifat lebih lunak, salah satu kasusnya adalah dukungan PPPI terhadap petisi Soetardjo. PPPI menyetujui Indonesia memiliki parlemen sendiri yang mempunyai hak sama dengan parlemen

di Negeri Belanda. PPPI memandang hak dan fungsi Volksrad belum sejajar dengan parlemen di Negeri Belanda.

Bab 4

Hubungan Perhimpunan Pelajar- Pelajar Indonesia dengan Perhimpunan Pemuda Lainnya

Dalam kaitan sejarah pergerakan ada tiga perhimpunan yang mempunyai hubungan khusus dengan PPPI yaitu Jong Java, Perhimpunan Indonesia, dan Indonesia Muda.

4. 1 PPPI dan Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia adalah perhimpunan mahasiswa Indonesia yang pertama didirikan, sedangkan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia adalah perhimpunan mahasiswa yang

pertama didirikan di Hindia Belanda. Mengingat jumlah mahasiswa yang sangat sedikit maka keanggotaan kedua organisasi mahasiswa itu juga sedikit.

Sampai tahun 1933, PPPI dan PI adalah wadah yang menampung aktivitas para mahasiswa pergerakan. PPPI menjadi tempat penampungan para mahasiswa Indonesia yang belajar di Hindia Belanda sedangkan PI menjadi tempat penampungan mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda.

Penasehat Urusan Bumi Putera, Dr. van der Plas, dalam laporannya kepada gubernur jenderal menyatakan bahwa PPPI menjalankan fungsi PI di Hindia-Belanda. Anggapan ini muncul karena beberapa anggota PI yang telah pulang ke Indonesia mempunyai pengaruh dalam PPPI seperti Sartono, Soenarjo, Soejoedi dan lain-lain.

Pendapat tersebut dibantah dengan tegas oleh Aboe Hanifah. Menurut Aboe Hanifah secara perhimpunan, sama sekali tidak ada hubungan antara PI di negeri Belanda dan PPPI di Indonesia. Dalam satu hal PPPI lebih radikal dari PI karena PPPI menolak pendapat PI yang anggotanya boleh masuk parlemen Belanda, sedangkan PPPI memboikot segala perwakilan Belanda di Belanda dan di Indonesia. Selain dari pada itu, PPPI juga menjalankan politik *Swadeshi*, total non-kooperasi, yang tidak disetujui oleh banyak partai politik, misalnya oleh PNI dan Soekarno (*Budaja Djaja*, No. 4, Tahun 1971).

Di balik perbedaan tersebut ada sisi lain yang menghubungkan kegiatan PPPI dan PI di Belanda. PI dalam waktu-waktu tertentu mengirimkan majalah "Indonesia Merdeka" ke Indonesia untuk PPPI. Kemudian dibalas oleh PPPI dengan mengirimkan majalah "Indonesia Raja" dan berita-berita penting ke Belanda. Pemerintah Hindia Belanda

pernah mencoba melarang peredaran majalah Indonesia Merdeka karena dianggap membahayakan Pemerintahannya. Namun majalah tersebut masih dapat diterima oleh tokoh-tokoh PPPI, seperti Soegondo Djojopuspito dengan diam-diam melalui pegawai pos bangsa Indonesia yang bertugas menyortir surat kiriman dari Belanda.

Gagasan-gagasan di antara kedua organisasi tersebut kemudian menyatu menjadi gagasan Indonesia bersatu dan merdeka. Gagasan tersebut menyebar ke organisasi pemuda lainnya.

Pada tahun 1930 pengaruh Perhimpunan Indonesia mulai surut. Banyak anggotanya yang sudah selesai pulang ke Indonesia. Dibukanya perguruan tinggi di Hindia Belanda menjadikan pemuda Indonesia yang belajar ke Negeri Belanda menurun.

4.2 PPPI dan Jong Java

HUBUNGAN antara PPPI dan Jong Java adalah sebuah hubungan yang unik. Jong Java adalah organisasi pemuda tertua dengan jumlah anggota terbesar. Sepak terjang Jong Java sangat menentukan pergerakan pemuda di Indonesia. Sedangkan PPPI adalah perhimpunan pemuda yang berpendidikan tinggi dengan jumlah anggota yang terbatas.

Sebagian pendiri PPPI juga adalah pengurus teras Jong Java. Ketika PPPI mempunyai ide untuk mempersatukan seluruh perhimpunan pemuda ke dalam wadah tunggal, para pendiri PPPI menggunakan Kongres Jong Java sebagai sarana. Namun bukan berarti gagasan PPPI sejalan dengan gagasan Jong Java, kadang kala bahkan bertentangan.

Kasus yang menarik mengenai hubungan antara kedua organisasi itu adalah ketika dilaksanakan Kongres Jong Java Kesembilan, kesepuluh dan kesebelas. Pada Kongres Jong Java Kesembilan yang diadakan di Solo, mulai tanggal 27 sampai dengan 31 Desember 1926, ide-ide persatuan yang ada dalam pikiran para pendiri PPPI yang pada waktu baru didirikan telah mempengaruhi perubahan anggaran dasar Jong Java. Perubahan yang tampak adalah pasal 3 Anggaran Dasar Jong Java, yang tujuan semula mendidik anggotanya supaya kelak mewujudkan Jawa Raya dengan menggalang persaudaraan antara penduduk pulau Jawa, Madura, dan Bali untuk kemajuan lahir dan batin. Maka dalam Anggaran Dasar baru diubah menjadi menggalang persaudaraan antara penduduk di nusantara untuk mewujudkan Indonesia bersatu dan Indonesia merdeka.

Pada Kongres Jong Java Kesepuluh yang diselenggarakan dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 1927, di Semarang, tampak kekukuhan Jong Java dalam mempertahankan dirinya. Dalam kesempatan itu, ketua PPPI, Abdoellah Sigit, dan sekretaris PPPI, Soegondo Djojopuspito, yang juga anggota Jong Java mengajukan ide pembentukan wadah tunggal organisasi pemuda. Untuk memperkuat usulannya, mereka menguraikannya dengan kutipan-kutipan dan tesis-tesis para filsuf politik seperti Hume, Montesqueu, dan Saint-Simon. Namun usulan tersebut ditolak peserta kongres. Peserta kongres tetap mendukung pedoman yang ditetapkan Pengurus Besar Jong Java yang menyatakan bahwa Jong Java sebagai perhimpunan yang berkembang pesat dan kini memiliki anggota 2500 orang memiliki hak untuk berdiri sendiri (Miert, 2003 : 498; *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, 1978 : 365).

Pada Kongres Jong Java berikutnya yang diadakan di Yogyakarta tahun 1928, PPPI mencoba lagi usulannya. Pada kongres yang kesebelas itu pembahasan didominasi oleh gagasan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang pernah kuliah di Belanda dan tokoh-tokoh PPPI. Pada intinya gagasan mereka adalah sikap politik yang sekuler, netral terhadap agama. Pada kongres itu Jong Java mulai menerima gagasan tentang fusi. Dalam keterangan resminya seusai kongres, Jong Java dengan tegas menyatakan bahwa sudah datang masanya untuk berfusi dengan membuktikan dalam tindakan yang nyata bahwa perkumpulan dapat mengorbankan dirinya.

Dalam Kongres Jong Java Keduabelas, 23-29 Desember 1929 di Semarang, rancangan pendirian badan fusi diterima dengan baik. Rancangan ini dibuat oleh Komisi Besar Indonesia Muda (Pringgogidgo, 1994 : 116).

4.3 PPPI dan Jong Indonesia

SEBELUM menjelaskan hubungan PPPI dan Jong Indonesia, penulis merasa perlu memperkenalkan lebih dulu karakteristik organisasi Jong Indonesia. Organisasi pemuda Jong Indonesia (yang kemudian dikenal dengan nama Melayu: Pemoeda Indonesia) didirikan pada tanggal 20 Pebruari 1927 di Bandung. Salah seorang pendirinya adalah Soetan Sjahrir yang waktu itu adalah murid AMS di Bandung (Marazek 1994:40). Landasan pendirian Pemoeda Indonesia adalah gagasan-gagasan dari pemikiran Partai Nasional Indonesia (PNI). Para pemimpin PNI seperti Soekarno, Soenarjo, Sartono dan Anwari

memainkan peran pendukung yang penting. Pembentukan Jong Indonesia diperuntukan untuk murid sekolah dan Pemuda pelajar dari umur lima belas tahun. Secara eksplisit ia mendukung sikap unitaristis. Tujuannya adalah menyebarkan dan memperkokoh cita-cita "Persatuan Nasional Indonesia". Perjuangannya bergerak di bidang politik dengan semboyannya: "persatuan nasional merupakan tujuan terdekat, negara Indonesia merdeka merupakan tujuan terakhir".

Selama sepuluh bulan berdiri, Jong Indonesia sudah mempunyai lima cabang yang berada di kota Bandung, Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Solo, dengan 750 anggota. Para anggota itu umumnya berasal dari perhimpunan-perhimpunan lain. Mereka tidak setuju dengan adanya garis pemisah etnik di dalam gerakan Pemuda itu, dan mendukung fusi semua klub Pemuda. Pada bulan-bulan pertama pendiriannya, Jong Indonesia memperoleh kesuksesan, karena keanggotaannya berasal dari berbagai suku, sehingga pantas disebut Pemuda Indonesia (Soeharto, 1981 : 268).

Pada bulan Oktober 1927 berhasil didirikan sebuah cabang kecil di tengah benteng Jawa, yaitu di Surakarta. Perhimpunan itu tumbuh pesat, dan sudah dapat memperoleh banyak simpati dari beberapa tokoh nasionalis sekuler yang lebih tua. Salah satu kegiatannya yang mencolok adalah didirikannya "Tjahja Volksuniversiteit". Di Bandung, Batavia dan Yogyakarta para siswa dan mahasiswa tanpa bayaran menyumbangkan pengetahuannya kepada "rakyat biasa". Kursus-kursus dalam mata pelajaran seperti menulis dan berhitung, bahasa dan ekonomi, ramai dikunjungi peminat (Mrazek 1994:42-44).

Setelah mengetahui karakteristik Jong Indonesia, pembaca dapat mengetahui bahwa PPPI dan Jong Indonesia adalah dua klub yang berbeda. Jong Indonesia dapat menerima

keanggotaan pelajar di atas lima belas tahun, sedangkan PPPI hanya menerima keanggotaan mahasiswa. Di balik perbedaan tersebut, kedua klub pelajar itu sepakat dalam memperjuangkan ideologi nasionalisme Indonesia sekuler. Kedua klub pelajar itu sering saling mendukung bila masing-masing melontarkan gagasan. Hal itu karena keduanya berada dalam barisan yang sama dalam memperjuangkan persatuan di kalangan pemuda. Salah satu contohnya adalah pada awal 1927, ketika PPPI mengusulkan kepada semua perhimpunan pemuda untuk secepat mungkin melakukan fusi, Jong Indonesia menyambut usul PPPI tersebut dengan bersemangat.

Gagasan PPPI dan Jong Indonesia sejalan dengan kelompok PNI nonkooperatif. Keduanya mengecam sikap mendua dari Jong Java dalam proses pemersatuan. Menurut mereka tokoh-tokoh Jong Java itu tidak dapat mengorbankan keterikatannya kepada budayanya sendiri. Kedua klub itu tidak lagi percaya dengan rencana-rencana Jong Java yang menurut mereka hanya akan mendatangkan “percekcokan antar sesama” (Jong Indonesia 1927, no. 3 (IPO 42/1927/113)).

Para pelajar dari Poemuda Indonesia dan PPPI adalah “orang Indonesia” berjuang untuk meniadakan garis-garis pemisah etnik dan keagamaan, dan lebih dari itu mereka ingin jauh lebih cepat bekerja. Orientasi mereka lebih bersifat politik dan budaya. Mereka tidak melihat adanya jaminan persatuan dalam sebuah “badan kontak” atau federasi. Struktur semacam itu hanya akan menyelimuti kelainan etnik dan keagamaan. Cita-cita mereka adalah fusi menyeluruh perhimpunan-perhimpunan pemuda. Dengan fusi tersebut para pemuda akan merasa sampai ke lubuk hatinya sebagai orang Indonesia”, hingga harapan akan terwujudnya kemerdekaan akan selalu berkobar. Sesudah tahun 1927, usaha untuk membentuk

“badan kontak” antar organisasi pemuda mengalami kegagalan. PPPI dan Jong Indonesia segera mengambil alih haluan dari Jong Java sebagai pemimpin gerakan pemuda. Jong Java karena keterbasan etniknya harus mengundurkan diri dari kepoloran, dan hanya dapat ikut berperan atas usul para pemimpin yang baru.

4.4 PPPI dan Indonesia Muda

Hubungan antara PPPI dengan Indonesia Muda merupakan hubungan dua organisasi pemuda yang bersifat nasional namun tidak menyatu. Hal yang kerap kali menjadi kritikan untuk PPPI adalah peran yang besar dari organisasi itu dalam melahirkan Indonesia Muda sebagai wadah perhimpunan pemuda, namun PPPI tidak melebur sepenuhnya ke dalam organisasi tersebut.

Hal ini disebabkan karena PPPI mengambil sikap ikut berpolitik secara terbuka. Kongres PPPI yang diadakan pada tanggal 20 – 23 September 1930 menghasilkan keputusan untuk menempatkan PPPI diantara perhimpunan Pemuda yang semata-mata menekankan kemajuan pendidikan anggotanya dan organisasi Pemuda yang lebih tertarik kepada kegiatan politik. Dengan demikian, PPPI mengambil sikap setengah-setengah. Sebagian memperlihatkan memiliki sifat Pemuda yang lebih menekankan pentingnya studi, tetapi sebagian lain mengikuti pengaruh partai-partai politik, khususnya PNI.

Bila ditilik dari sejarah pembentukan Indonesia Muda, tampak jelas peran tokoh-tokoh PPPI. Di mulai pada tanggal 23 April 1927 dalam sidang bersama wakil Pengurus Besar Jong Sumantranen Bond (Pemuda Sumatera), Jong Bataks

Bond (Pemuda Batak), Jong Minahasa (Pemuda Minahasa), PPPI (Mahasiswa), Pemuda Indonesia dan Jong Java mengadakan pembicaraan serius mengenai:

1. Indonesia Merdeka harus menjadi ideal segala anak Indonesia
2. Segala perserikatan-perserikatan pemuda harus berdaya upaya menuju mempersatukan diri dalam suatu perkumpulan.

Kemudian ada usul dari Jong Java untuk melancarkan suatu cara kerja dan prosedur fusi yang lebih tegas melalui masa peralihan yang singkat. Inti usulan Jong Java adalah sebagai berikut:

1. Agar membentuk satu badan fusi total antara semua perhimpunan-perhimpunan pemuda Indonesia melalui suatu masa peralihan singkat guna peleburan dan pembentukan fusi.
2. Akan dibentuk sebuah Komisi Persiapan. Tiap-tiap perhimpunan pemuda mengirimkan dua orang wakil dalam komisi.
3. Tugas komisi adalah merencanakan segala persiapan untuk melancarkan peleburan perhimpunan-perhimpunan pemuda dan membentuk badan fusi. Untuk itu komisi merencanakan satu Program Kerja dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, mengatur hal badan-badan / perhimpunan seazas seperti kepanduan, keputrian dan lain-lain.
4. Komisi menyampaikan segala rencana persiapan itu kepada Pengurus Besar masing-masing perhimpunan, yang setelah menyetujuinya segera mengadakan kongres pembubaran masing-masing.

Kemudian setelah rencana kerja dan prosedur itu disetujui oleh perhimpunan masing-masing dibentukkan Komisi Besar Indonesia Muda yang pimpinannya sehari-hari diserahkan kepada tiga perhimpunan pemuda terbesar yakni: Jong Java, Pemuda Sumatera dan Pemuda Indonesia yang masing masing mengirimkan 3 orang wakil dan komisi.

Susunan Komisi Besar Indonesia Muda adalah sebagai berikut R. Koentjoro Poerbopranoto (Ketua), Mohammad Yamin (Wakil Ketua), R.M. Joesoepadi Danoehadiningrat (Sekretaris), Assaat Dt. Mudo (Bendahara).

Anggota-anggota :

1. R.T. Djaksodipoeri (Jong Java)
2. Adnan Kapau Gani (Pemuda Sumatera)
3. Mochammad Tamzil (Pemuda Indonesia)
4. R. Soediman Kartohadiprodjo (Jong Java)
5. Kroeng Raba Nasution (Pemuda Indonesia)

Dalam setahun kerja keras (1929-1930) Komisi besar Indonesia Muda berhasil mengeluarkan risalah yang disebut, pamflet Komisi Besar Indonesia Muda yang memuat:

- a. anjuran / prosedur pembentukan fusi
- b. rencana Anggaran Dasar
- c. Anggaran Rumah Tangga Indonesia Muda dengan penjelasan seperlunya.

Setelah prosedur fusi serta rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda dalam kongres pembubarannya masing-masing menurut anjuran dan petunjuk-petunjuk dalam "Pamflet Komisi Besar IM", maka pada akhir tahun 1930 diadakan kongres Indonesia Muda pertama di Solo di Gedung

Habiproyo. Kongres itu berlangsung sampai dengan tanggal 2 Januari 1931. Pada malam penutupan Kongres itu dinyatakan secara resmi lahirnya ksatria muda dalam gelanggang perjuangan persatuan dan kemerdekaan bangsa. Sebagai ketua Pengurus Besar Indonesia Muda terpilih Soewaji Prawirohardjo. Pada kongres lahirnya Indonesia Muda yang bersejarah itu ikut pula melakukan peranan penting antara lain Ibu Bintang Soedibjo (Ibu Soed), Mr. Wongsonegoro, Dr. Soedardjo Tjokrosisworo, Dr. Roesmali, Dr. Adnan Kapau Gani.



Komisi Besar Indonesia Muda

Sementara itu, setelah IM terbentuk pada tahun 1931, walau PPPI tidak meleburkan diri dalam IM, ada beberapa anggota PPPI yang menjadi anggota Indonesia Muda (45 *Tahun Sumpah Pemuda*, 1974: 179). Sehubungan dengan keanggotaan rangkap tersebut, Indonesia Muda dicap berbau politik, sehingga PID selalu mendatangi rapat-rapat tertutup Indonesia Muda.

Untuk menjaga jangan sampai ada keanggotaan rangkap dalam jajaran pengurus Indonesia Muda dan PPPI, maka yang terpilih dalam jajaran PPPI tidak lagi duduk dalam Indonesia Muda, demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh Soejono Hadinoto mantan ketua Indonesia Muda, setelah terpilih sebagai ketua PPPI kemudian melepaskan kedudukannya di Indonesia Muda.

Bab 5

Masa Surut PPPI

5. 1 Tekanan Politik Pemerintah Kolonial

Dalam kehidupan kolonial biasanya terdapat pertentangan kepentingan. Belanda dengan segala cara berusaha mengeksploitasi bangsa Indonesia, sementara bangsa Indonesia berkeinginan untuk menentukan nasib sendiri dan memanfaatkan kekayaan tanah air untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Pertentangan ini disebut antithese colonial (*45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1973 : 41).

Bagi pemerintah kolonial sikap dari antithese kolonial adalah dalam bentuk tekanan politik penguasa. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan tekanan politik terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi

pergerakan lainnya, termasuk perhimpunan-perhimpunan pemuda. Berbagai macam larangan, seperti larangan mengadakan rapat berhasil mengurangi kekuatan kaum pergerakan, hal itu juga sangat dirasakan PPPI dalam menghalangi kegiatan para mahasiswa. Di tahun itu pula, salah seorang tokoh PPPI, Djohan Sjahroezah, dituduh polisi kolonial karena tulisannya di majalah *Indonesia Raja* yang diterbitkan PPPI. Mahasiswa sekolah tinggi hukum ini kemudian dibela oleh Agus Salim, yang di kemudian hari menjadi mertua Djohan Sjahroezah. Karena ketidaksihan Agus Salim dalam berdiplomasi di persidangan, keputusan hakim menjadi satu setengah tahun, berkurang dari tuntutan Jaksa. Setelah keluar dari tahanan Djohan Sjahroezah disodori sebuah surat ancaman yang menyatakan kalau ia masih ingin melanjutkan sekolahnya ia tidak boleh mencampuri urusan politik lagi akhirnya, sampai Jepang masuk ia tidak menamatkan kuliahnya.

Setelah kasus Djohan Sjahroezah kembali pemerintah kolonial melakukan tekanan politik dengan menangkap para pemimpin Indonesia Muda dan PPPI yang dianggap ikut andil dalam penulisan artikel yang menentang pemerintahan kolonial. Artikel itu muncul di majalah *Indonesia Raja* terbitan PPPI.

Tekanan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia terus berlanjut. Pada tahun 1933, PPPI tidak bisa menyelenggarakan Kongres Tahunan sehubungan dengan ketatnya pengawasan Pemerintah Hindia-Belanda terhadap PPPI. Sebagai gantinya Pengurus PPPI menyelenggarakan dua rapat tertutup pada tanggal 16 dan 18 Desember 1933. Pemilihan Rapat Tertutup ini disebabkan proses perizinannya tidak seketat dibanding Kongres Tahunan. Rapat tertutup pertama pada tanggal 6

Desember 1933 dimulai pada pukul 20.30 bertempat di gedung klub Jalan Kramat nomor 106, Weltevreden.

Rapat ini dipimpin Hendromartono, Ketua PPPI. Rapat dihadiri oleh 60 orang termasuk beberapa tokoh mantan pengurus PPPI seperti Muhammad Yamin, Koentjoro Poerboprato, dan Soerjadi. Dalam sambutan pembukaannya ketua menyatakan bahwa PPPI sebagai perhimpunan mahasiswa adalah gerakan Pemuda yang juga bergerak di bidang politik. Dengan demikian wajar apabila PPPI melancarkan aksi protes atas penangkapan 4 pimpinan PNI yaitu Soekarno dan kawan-kawan, protes terhadap Peraturan Pengawasan atas Pendidikan Swasta. Aksi protes itu sejalan dengan tujuan PPPI yang ditetapkan dalam anggaran dasar yakni *Mencapai Indonesia Merdeka*. Karena aksi politiknya itu, PPPI akan mendapat tekanan yang keras dari pihak pemerintah colonial Hindia Belanda dan pers Belanda.

Belanda memandang negatif pada pergerakan Indonesia, setiap kegiatan yang dilakukan oleh kaum pergerakan baik yang dilakukan partai politik maupun perhimpunan pemuda selalu dimata-matai.

Masalah penerbitan PPPI terulang pada tahun 1936. Kali ini pemerintah kolonial menjita semua majalah *Indonesia Raja*. Pada tahun 1933 Pemerintah Hindia-Belanda melarang PPPI mengadakan kongres ke-5. Setelah itu pengaruh PPPI terasa mulai berkurang di kalangan perhimpunan Pemuda lainnya. Bahkan sebagian anggotanya menggabungkan diri kedalam Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang disponsori Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang telah memperjuangkan Indonesia berparlemen.

Sayangnya, tekanan yang dilakukan pemerintah kolonial diikuti pula kurangnya perhatian dari mantan-mantan tokoh-tokoh PPPI terhadap perjuangan mulia PPPI. Pengurus PPPI menyesalkan bahwa banyak bekas anggota PPPI yang kurang begitu peduli dengan keberadaan PPPI setelah mereka menamatkan pendidikan. Sikap itu menimbulkan rasa pesimis di kalangan pengurus yang menganggap gerakan kelompok intelektual segera mati. Karena itu para pengurus PPPI mengingatkan kepada para mantan anggotanya dengan mengajukan pertanyaan, “Di mana Anda akan berada dengan semboyan indah itu? Di mana Anda akan berada dengan janji-janji indah itu?” Ketua menambahkan, “Sungguh menyakitkan bila menduga bahwa masih ada banyak orang Indonesia yang tidak terlibat dalam politik, yang tidak berjuang demi kebebasan Indonesia. Namun yang lebih menyakitkan lagi adalah dugaan bahwa para bekas anggota PPPI memberikan bukti telah mengkhianati semboyan perjuangannya sendiri.”

5.2 Munculnya Berbagai Perhimpunan Pelajar Baru

Pada tahun 1933 pengaruh PPPI mulai menurun. Selain tidak adanya kesinambungan perjuangan para alumni PPPI, juga disebabkan semakin banyaknya perhimpunan pelajar dan mahasiswa, yang dapat dimasuki oleh para Pemuda pelajar. Salah satu saingan PPPI yang berhasil yang menjedot banyak anggota PPPI adalah USI (Unitas Studiosorum Indonesianensis) yang didirikan atas desakan professor-

profesor Belanda. Mereka berpendapat tugas para pelajar-pelajar sekolah tinggi sebaiknya hanya belajar mencari ilmu, mempertinggi kesenian dan tidak berpolitik. Oleh sebab itu, USI tidak berpolitik dan kegiatannya lebih banyak untuk tujuan rekreasi, seperti pesta, tour dsb.

Selain itu, perhimpunan lain yang menjedot banyak anggota PPPI adalah Studenten Islam Studieclub (SIS) yang lahir tahun 1936. Tujuan perhimpunan ini menambah pengetahuan tentang Islam dan Indonesia bagi para mahasiswa. Dengan demikian SIS tidak hanya menjadi saingan PPPI, melainkan sekaligus menjadi saingan Jong Islamieten Bond dan Islamienten Merdeka. Di tahun itu pula berdiri organisasi *Indonesische Vrouwelijke Mahasiswaen Vereeniging* (IVSV, perhimpunan untuk pelajar-pelajar wanita sekolah tinggi Indonesia).

Akibat dari banyaknya perhimpunan-perhimpunan pemuda pelajar yang tidak berpolitik dan tekanan pemerintah kolonial membuat suasana pergerakan politik pemuda pelajar menjadi lesu dan menurunkan minat para mahasiswa bergabung dengan PPPI. Suasana itu berlainan dengan waktu sebelum 1933, dimana para mahasiswa yang baru masuk sekolah tinggi hanya mempunyai sedikit pilihan perhimpunan yang umumnya banyak berkiprah di bidang politik. (Pringgodigdo, 1994 : 214). Sejalan dengan perjalanan waktu, memasuki tahun 1936 pengaruh dan kegiatan PPPI semakin menurun. Kiprahnya mulai digantikan oleh perhimpunan-perhimpunan Pemuda pelajar yang lain.

5.3 Kedatangan Jepang

Selama periode PPPI berdiri dari tahun 1926 sampai dengan 1942, telah beberapa kali dilakukan suksesi kepemimpinan. Di antara tokoh-tokoh yang pernah memimpin PPPI, Chaerul Saleh adalah tokoh yang paling luar biasa. Hal itu disebabkan karena kecerdikan dan keberanian dari tokoh yang terakhir memimpin PPPI itu.

Dari hasil rapat umum PPPI tahun 1939, Chaerul Saleh terpilih sebagai ketua. Di bawah kepemimpinan Chairul Saleh, PPPI melibatkan diri ke dalam politik praktis yang radikal. Menyadari bahwa diantara partai politik kurang terjalin kerja sama dan mulai kendur melaksanakan azas dan tujuannya, Chairul Saleh menulis artikel berjudul "Verbrokkelingen" (bercerai berai). Dalam rapat GAPI yang menuntut Indonesia berparlemen, delegasi PPPI yang dipimpin Chairul Saleh mengajukan mosi berisikan suatu sanksi bahwa bila usul Indonesia Berparlemen ditolak oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka para anggota partai politik yang tergabung dalam GAPI akan keluar meninggalkan jabatannya sebagai pegawai Gubernemen (Pegawai Negeri). Oleh karena anggota-anggota kongres lainnya menolak tuntutan ini, maka utusan-utusan PPPI meninggalkan rapat, tetapi tidak mengundurkan diri sama sekali dari Kongres Rakyat Indonesia itu. (Pringgodigdo, 1994 : 215).

Kebijakan PPPI lainnya yang dianggap radikal dan melawan arus adalah pertentangannya dengan Bataviasche Studenten Corps (Perkumpulan Mahasiswa Batavia). Pada waktu Bataviasche Studenten Corps (Perkumpulan Mahasiswa

Batavia) mengambil prakarsa untuk mengajukan *aanhankelijkheidsbetuyging* (pernyataan setia) kepada Pemerintah Hindia-Belanda sehubungan dengan pernyataan perang dari Kerajaan Belanda kepada Jerman-Italia-Jepang dan mengajak perkumpulan mahasiswa yang lain seperti USI, IVSV, CSV, Sint Belaminus, SIS, Tak Chi Oh, dan PPPI. PPPI dengan tegas menyatakan penolakannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Chairul Saleh (Ketua PPPI), Soepeno, dan Achmad Astrawinata, dua nama belakang adalah wakil ketua PPPI.

“Tujuan PPPI adalah Indonesia Merdeka, maka dari itu, kami menolak untuk menandatangani pernyataan. Pernyataan demikian jelas bertentangan dengan tujuan perhimpunan. Saat runtuhnya Pemerintah Hindia-Belanda inilah yang memang kami tunggu-tunggu”, demikian antara lain yang diucapkan Chairul Saleh.

Mendengar ketegasan pemimpinnya, secara bercanda teman-teman di PPPI mengatakan kepada Chairul Saleh, “Lu bertiga siap-siap saja, besok atau lusa digiring ke PID dan dimasukan ke penjara!” Untung yang hal-hal dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi (Hadisuwito : 1993, 14 – 15).

Pada tahun 1940, atas prakarsa Chairul Saleh, pimpinan PPPI memberanikan diri menjewa rumah di Laan Kadiman No. 9 (sekarang jalan Gunung Sahari) Batavia untuk dijadikan Balai Pertemuan (Clubhuis) (Hadisuwito : 1993, 14 – 15). Pada waktu malam gembira yang diselenggarakan di balai tersebut, dalam rangka penerimaan anggota baru PPPI, Amir Sjarifoeddin Harahap sebagai anggota luar biasa dengan nada kagum berucap dalam sambutannya, “PPPI mempunyai balai pertemuan!” (terlalu indah apabila menjadi kenyataan

(Hadisuwito : 1993, 14 – 15). Kalimat itu langsung disambut tertawa oleh Chairul Saleh dan Siegfried Hadipranoto.

Beberapa kebijakan Chaerul Saleh lainnya yang dianggap menonjol adalah diselenggarakannya *studenten-kamp*, mendirikan *club huis*, media cetak PPPI, *Indonesia Raja* terbitnya lebih teratur. Chaerul Saleh sama sekali tidak mementingkan kedaerahan, dia sangat memperhatikan teman-teman dari daerah lain.

Namun usaha Chaerul Saleh untuk terus mengembangkan PPPI menemui jalan buntu setelah kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Kedatangan bala tentara Jepang menghadirkan hukum kemasyarakatan darurat perang yang sangat membatasi aktifitas organisasi-organisasi di masyarakat. (*45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1974 : 182).

PADA tahun 1939 angin perubahan yang akan menggusur pemerintahan Hindia Belanda mulai berhembus. Di mulai dari pecahnya Perang Dunia II di Eropa, ketika Jèrman menyerbu Polandia. Pada tahun itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) mengusulkan rumusan kepada Pemerintah Hindia Belanda yang berbunyi : “Indonesia Berparlemen”. Pemerintah Hindia Belanda menolak usulan tersebut. Hal itu menimbulkan keyakinan di kalangan nasionalis Indonesia bahwa pihak kolonialis Belanda tidak bisa diharapkan apa-apa pada hal yang menyangkut kemerdekaan.

Ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman, Pemerintah Hindia Belandapun terus bersikeras untuk tidak memberikan konsesi politik kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Hal itu berdampak ketika Jepang menyerbu Indonesia dalam rangka usahanya untuk membangun Imperium di Asia Timur dan Tenggara, pihak nasionalis tidak bergerak untuk membantu pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akibatnya pemerintah

Hindia Belanda berjuang mempertahankan pemerintahannya tanpa bantuan dari rakyat Indonesia. Dalam hitungan tiga bulan, dimulai dari awal tahun 1942 hingga Maret 1942, seluruh wilayah Hindia Belanda secara resmi jatuh ke tangan Jepang. Tepatnya, tanggal 8 Maret 1942 ditandatangani penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H, Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, maka berakhirilah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Di awal pemerintahannya, Pemerintah Pendudukan Militer Jepang mengeluarkan peraturan pembubaran seluruh organisasi yang berdiri sejak jaman Hindia Belanda. Peraturan ini berimbas kepada PPPI. Maka dengan resmi PPPI dinyatakan bubar pada tahun 1942. Dengan bubarnya PPPI bukan berarti kiprah para tokoh-tokohnya berakhir.

Di masa pendudukan Jepang, banyak mantan tokoh-tokoh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang berjuang terus untuk tujuan kemerdekaan di masa pendudukan Jepang. Ada yang bergerak di "bawah tanah" dengan menjalin kerjasama dengan jaringan Amir Sjariffudin ada pula yang menghimpun dalam kelompok pemuda informal Menteng 31, yang kemudian menjadi motor penggerak dicetuskannya proklamasi kemerdekaan RI. Salah satu tokoh dari kelompok Menteng 31 adalah Chaerul Saleh.

Daftar Sumber

A. Arsip

Laporan Bupati Batavia kepada Resident Batavia 7 Maret 1929, terlampir dalam Surat Jaksa Agung kepada Gubernur Jenderal 25 Maret 1929 Nomor 468/A.P.V 24 Mei 1929 – X 10

Laporan Hoofdcommissaris van Politie kepada Resident Batavia 9 Maret 1929, 250/Rahasia, terlampir dalam Surat Jaksa Agung kepada Gubernur Jenderal 25 Maret 1929 Nomor 468/A.P.V 24 Mei 1929 – X 10

B. Buku

Hatta, Mohammad. 1979. *Mohammad Hatta Memoirs*. Jakarta : Tinta Mas.

Kerapatan Besar. 1931. *Kerapatan Besar Indonesia Moeda jang ke-1, 29 Des 1929 – 2 Jan 1931 di Soerakarta*. Weltevreden

Martha, Ahmaddani G. dan kawan-kawan. 1978. *Pemoeda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda.

-
- .1984. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta, Indo – Media Communication.
- Mawardi, Sidi. 2000. *Bibit Perseteruan Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler ; Pengalaman Jong Islamieten Bond 1925 - 1942*. Yogyakarta: Sandi Kota.
- Penders, CLM. (ed.). 1981. *Mohammad Hatta, Indonesian Patriot, Memoirs*. Singapore : Gunung Agung.
- Poesponegoro, Marwato Djoened, et al.. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A. K.. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Cetakan Ketigabelas*. Jakarta : P. T. Dian Rakyat.
- Soeharto, Pitut dan A. Zainoel Ikhsan. 1981a. *Aku Pemuda Kemarin Di Hari Esok. Capita Selekt. Kumpulan tulisan asli, lazing, pidato tokoh pergerakan Kebangsaan 1913 – 1938*. Jakarta.
- Soeharto, Pitut dan A. Zainoel Ikhsan. 1981b. *Cahaya di Kegelapan. Capita Selekt. Kumpulan tulisan asli, lazing, pidato tokoh-tokoh kumpulan BO dan SI*. Jakarta.
- Soeharto, Pitut dan A. Zainoel Ikhsan. 1981c. *Maju Setapak. Capita Selekt. Kumpulan tulisan asli tokoh-tokoh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, JBB, dan lain-lain*. Jakarta.

Suminto, H. Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta : LP3ES.

Hans Van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*, Terjemahan Sudewo Satiman (Jakarta: KITLV-Jakarta, Hasta Mitra, dan Pustaka Utan Kayu, 2003), hal 133

Yayasan Gedung-gedung Bersejarah. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah.

A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cetakan XIII, 1994 (Jakarta : Dian Rakyat), hal. 114 – 115.

C. Majalah dan Surat Kabar

Majalah Het Licht

Majalah *Jong Sumatra*

Majalah *Indonesia Raja*

Surat Kabar *Persatoean Indonesia*

D. Artikel

http://duamata.blogspot.com/2006_02_01_duamata_archive.html seperti yang diterima pada 22 Agu 2006 20:49:55 GMT

Lampiran 1

DAFTAR KETUA PPPI

Adapun urutan tokoh-tokoh yang menjabat Ketua sebagai berikut :

1. Sigit (Abdullah Sigit)
2. Soegondo Djojopuspito
3. Soenarko
4. Soemitro Reksodipuro
5. Iman Soedjahri
6. Wilopo
7. Samijono
8. Soetomo
9. Rasjid
10. Chaerul Saleh

BIOGRAFI SINGKAT SOEMITRO REKSODIPOETRO

Sumitro Reksodiputro lahir tanggal 3 September 1907 di Tuban

1. Pendidikan:

- a) Tahun 1921 lulus Sekolah Holland Inlandscheschool (HIS) di Rembang
- b) Tahun 1921 melanjutkan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Semarang, selama 4 tahun namun tidak diselesaikan sekolahnya, dan pindah ke Yogyakarta
- c) Tahun 1928 lulus Sekolah Algemeene Middlebaar School (AMS) di Yogyakarta
- d) Tahun 1936 lulus Sekolah Tinggi Hukum Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta, selama 9 tahun studinya dan mendapat gelar Sarjana Hukum (SH).

2. Pekerjaan:

- a) Tahun 1936 – 1941 bekerja jadi advokat pertama di Malang kemudian kedua pindah ke Surabaya tetap menjadi advokat lalu pindah lagi ke Sukabumi dan akhirnya pindah ke Jakarta sampai Jepang masuk ke Indonesia.
- b) Tahun 1942 – 1945 menjadi pegawai pemerintahan Jepang.
- c) Tahun 1947 – 1948 bekerja pada Sekretariat Kabinet Perdana Menteri Sutan Syahrir.
- d) Tahun 1948 – 1949 bekerja pada Kementrian dan Pengajaran semasa Menteri Mr. Suwandi bertepatan terjadinya clash II dengan Belanda.
- e) Tahun 1950 - 1957 bekerja menjadi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran semasa Menteri Abu Hanifah, lalu

pindah ke Biro Hubungan Luar Negeri pada Kementerian yang sama.

- f) Tahun 1958 – 1962 menjadi Atase Kebudayaan di Luar Negeri.
- g) Tahun 1963 - 1964 kembali ke tanah air dan bekerja kembali di Kementerian dan Pengajaran sampai pensiunnya.
- h) Tahun 1965 bekerja pada profesinya yang dulu sebagai Advokat sampai akhir hayatnya.

(Suhadiyono, *Laporan Hasil Penelitian Dengan Cara Interview, Tentang Sumpah Pemuda, Pemuda Indonesia, PPPI dan Sekitarnya, antara Gedung Sumpah Pemuda Dengan Seorang Tokoh Angkatan '28 Mr. Sumitro Reksodiputro*, Gedung Sumpah Pemuda Jakarta 1979, hal. 2 – 4)

PIAGAM
MENDIRIKAN PERKUMPULAN
INDONESIA MUDA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1930
MASUK 1 JANUARI 1931
PUKUL 12 MALAM.
Di kota SURAKARTA.

Kami anggota Komisi Besar Indonesia Muda, semuanya berkedudukan di kota Jakarta, memandang sebagai suatu kehormatan yang tertinggi, karena mendapat kesempatan yang mulia membubuhkan tanda tangan kami pada kesudahan surat piagam ini, seperti perlambang penutupi perjalanan kami Komisi Besar melakukan pekerjaan dan kewajiban hendak mempersatukan putera dan puteri Indonesia yang berbangsa satu, bertumpah darah satu dan bersemangat yang satu, seperti telah diperintahkan oleh keputusan kerapatan besar.

Pertama :

Perkumpulan Jong Java, pada awalnya bernama Tri Koro-Dharmo, di kota Semarang pada tanggal 27 Desember 1929.

Kedua :

Perhimpunan Pemuda Indonesia, di kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1929.

Ketiga :

Perkumpulan Jong Celebes, di kota Jakarta pada tanggal 15 Maret 1930.

Keempat :

Perkumpulan Pemuda Sumatra, pada awalnya bernama Jong Sumatranen Bond, di kota Jakarta pada tanggal 23 Maret 1930.

Dan pada saat ini, pada petang Rabu malam Kamis tanggal 31 Desember 1930 masuk 1 Januari 1931, sampailah kami pada waktu yang paling akhir melakukan kewajiban, seperti yang terserah pada kami Komisi Besar, dan terbukalah zaman baru, tempat dasar yang tiga dan tujuan yang satu dibawah panji-panji perkumpulan Indonesia Muda, atau yang percaya kepada dasar dan tujuannya sehingga ternyatalah dengan seterang-terangnya keperluan dan hak Indonesia Muda akan berdiri;

Dan kami bubuh tanda tangan kami di hadapan bangsa Indonesia dan di tengah-tengah kerapatan besar di kota Surakarta yang dilangsungkan sejak dari tanggal 28 Desember 1930 sampai tanggal 3 Januari 1931;

Yang diatur dan dipimpin menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan Indonesia Muda, seperti yang disyahkan oleh persidangan Komisi Besar di kota Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 1929;

Yaitu setelah memperhatikan segala yang termaktub dalam surat siaran kami Komisi Besar dengan namanya aturan mendirikan perkumpulan Indonesia Muda;

Dan setelah mendengarkan pembicaraan dan menimbang segala putusan yang diambil dalam kerapatan besar perkumpulan yang empat;

Dan yakin kepada dasar yang tiga dan tujuan yang satu, serta percaya kepada semangat yang berdebar-debar dalam dada kerapatan besar ini;

Lalu kerapatan mengambil putusan atas 25 cabang Indonesia Muda di seluruh tanah Indonesia, yang membawa 143 hak suara dan mengutusi 2393 anggauta, mendirikan perkumpulan Indonesia Muda dengan segala upacara, yang memakai susunan dan tujuan seperti yang tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan Indonesia Muda;

Dan seterusnya pimpinan perkumpulan Indonesia Muda kami serahkan kepada Pedoman Besar Indonesia Muda dengan mengeluarkan pengharapan dan keyakinan, bahwa pekerjaan kami ini akan diteruskan dengan segala kekuatan dan tenaga, supaya segala pemuda, putera dan puteri dapat mempersembahkan baktinya kedalam perdupaan Tanah air dan Bangsa, supaya sampai ke Indonesia Raya.

KAMI KOMISI BESAR INDONESIA MUDA

Koentjoro Purbopranoto	Soewaji Prawiroharjo
Muhammad Yamin	Adnan Gani
Joesoepadi	Tamzil
Sjahrial	Soerjadi
Assaat	Pantouw

SURAKARTA.

31 Desember 1930

1 Januari 1931

Sekitar Lahirnya Indonesia Muda

Oleh :

Prof. R. Koentjoro Poerbopranoto, S.H.
(Ketua Komisi Besar Indonesia Muda)

Saya rasa anjuran tokoh-tokoh Indonesia Muda seperti Dr. H. Roeslan Abdulgani, Brigadir Jenderal A. Latief Hendraningrat dan lain-lain agar semangat Indonesia Muda dikobarkan kembali, justru di alam Indonesia merdeka sekarang ini sungguh tepat sekali. Dan *timing*-nya untuk mengadakan pertemuan besar antara Perhimpunan Indonesia Muda sekarang dan para bekas-bekas anggota Indonesia Muda dulu seperti direncanakan oleh panitia itu rasanya sungguh baik sekali. Bukankah cita-cita yang diidam-idamkan oleh Indonesia Muda dan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Indonesia Muda itu mencapai Indonesia Raya! Kebesaran Indonesia sekarang dengan kembalinya daerah Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi dahulu telah dibayangkan dalam seruan Indonesia Muda, bahwa menurut sejarah maupun paham kebangsaan kita wilayah Indonesia Raya meliputi bumi, kepulauan, perairan dan angkasa seluruh Nusantara dari sabang hingga Merauke/Irian Barat.

Baiklah kiranya kami sampaikan bahan-bahan tertulis di bawah ini guna memenuhi permintaan Panitia tentang hal ikhwal sekitar lahirnya Indonesia Muda sekedar sebagai sumbangsih kami, seorang pandu tua, guna ikut mengobarkan paduan semangat kebesaran dan kesatuan bangsa Indonesia

yang sungguh diperlukan dalam taraf penyelesaian revolusi nasional kita sekarang ini.

Dorongan Kongres Pemuda Pertama dan Kedua.

Bahwasanya semangat kesatuan diantara perhimpunan-perhimpunan pemuda kita, bahwa mereka itu seharusnya menjadi pendorong akan lahirnya satu generasi baru bangsa Indonesia yang besar dan yang tidak berpecah-belah, itulah sudah lama menjadi idam-idaman para pemuda kita. Akan tetapi suasana kolonial khusus sesudah Perang Dunia Pertama selesai itu, lebih menekan mereka dan mempersempit lagi kesempatan bergerak dan berperhimpunan, lebih-lebih di kalangan pemuda pelajar. Maka dengan keadaan pemerintahan tangan besi kolonial Hindia Belanda dewasa itu kemungkinan bagi para pemuda untuk mengobarkan semangat persatuan di kalangan masing-masing maksimal hanya terbatas di kalangan perhimpunan-perhimpunan pemuda pelajar yang berazaskan kedaerahan atau kepulaun, dengan tujuan memajukan pelajaran atau kesenian/kebudayan. Maklum tujuan politik, bahkan idé kebangsaan yang lebih luas dewasa itu dianggap tabu (pemali) dandilarang sama sekali sehingga mengucapkan perkataan "Merdeka" didalam satu rapat Pemuda itu saja bagi PID (dinas politik) kolonial sudah cukup alasan untuk menutup dan membubarkan rapat itu.

Maka meskipun semangat untuk mencapai persatuan di kalangan itu sudah mulai timbul, namun secara organisasi belum dapat bangkit, sehingga bentuk perhimpunan Pemuda-pemuda kita sementara itu tetap bercorak kedaerahan seperti Jong

Sumatra. Jong-Celebes Sekar Rukun (Pemuda Sunda), Jong Java (Trikoru Dharmo) dll.

Terdorong oleh semangat persatuan yang sedang timbul itu perhimpunan Jong Java dalam kongresnya ke-8 di Bandung pada akhir tahun 1925 memutuskan untuk memperluas tujuannya, dan dalam pasal tentang maksud-tujuan itu dimuatlah ide kesatuan itu sbb.: "menyiapkan anggotanya untuk menghidupkan rasa persatuan diantara semua suku-suku bangsa Indonesia, sehingga kelak mencapai Indonesia Merdeka". Keputusan Kongres Bandung yang amat progresif itu pada tahun 1926 disambut oleh tindakan spontan segolongan Pemuda-pemuda kita untuk mendirikan satu perhimpunan baru berdasarkan kesatuan Indonesia, yakni perhimpunan "Pemuda Indonesia" (Jong Indonesia) di Bandung dibawah pimpinan Sdr. Joesoepadi.

Pada tahun 1926 itu pergerakan kebangsaan seluruhnya dari kaum tua maupun para pemudanya mendapat pukulan yang amat hebat dari pemerintah kolonial Belanda, yakni dijatuhkannya hukuman pengasingan dan pembuangan terhadap beratus-ratus bahkan beribu-ribu pemimpin pergerakan ke Merauke (Boven-Digul) atau Tanah Merah dan lain-lain tempat akibat pemberontakan rakyat di Sumatera Barat, Jawa Barat dll. Yang bermaksud untuk menumbangkan pemerintah kolonial itu. Juga beberapa pemimpin Partai Nasional Indonesia antara lain Bung Karno, telah ditangkap dan dikenakan hukuman "exorbitante rechten" itu, dan setelah dihukum penjara oleh pengadilan kolonial Bandung. Bung Karno dibuang ke Ende (Flores).

Peristiwa pengasingan dan pembuangan pemimpin-pemimpin pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan oleh

pemerintah kolonial Belanda dewasa itu justru merupakan cambuk bagi para Pemuda Indonesia. Yang mempergiat usahanya dengan mempercepat dinamik perjuangannya dan memperkeras pelaksanaan idée kesatuan antara seluruh Pemuda Indonesia. Pada bulan Agustus 1926 oleh "Jong Java" ditawarkan usul kepada Komite Kongres Pemuda Yang ke-1 supaya dibentuk satu badan federasi antara semua organisasi Pemuda kita, tetapi usul itu tidak berhasil. Kongres Pemuda Indonesia yang ke-1 itu dihadiri oleh tujuh organisasi Pemuda, yaitu Pemuda Sumatera, Pemuda Sunda, (Sekar Rukun), Pemuda Batak, Pemuda Minahasa, Pemuda Ambon, Pemuda Islam dan Jong Java, dan dipimpin oleh Sdr. Moh. Tabrani (dari Jong Java). Kemudian pada bulan Pebruari dan April tahun 1927 berikutnya Jong Java mengajukan kembali sebuah rencana kerja yang diperbaiki supaya semua organisasi Pemuda mengusahakan sekuat tenaga untuk menyatakan diridlam satu perhimpun pemuda Indonesia dan bersama-sama bergerak kearah Indonesia Merdeka.

Cita-cita serta usaha bersama kearah kesatuan itu sudah selm satu tahun lebih direncanakan, tetapi, follow-ufnya belumlah dapat diwujudkan secara konkrit. Maka kemudin atas dorongan kuat dari PPPI (Persatuan Mahasiswa Indonesia) untuk kedua kalinya semua top organisasi-organisasi Pemuda di Jakarta dikumpulkan kembali dan diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia ke-2 dibawah pimpinan Sdr. Soegondo Djojopoespito ketua PPPI. Dan kecuali tujuh perhimpunan pemuda daerah-daerah pada kongres Pemuda ke-2 ikut pula PPPI dan organisasi Pemuda "Kaum Betawi", jadi sembilan buah organisasi Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua itu Almarhum Muh. Jamin mewakili Pemuda Sumatera

dan kami sendiri mewakili “Jong Java”. Dan rupanya yang Mahakuasa telah menakdirkan jatuhnya Wahyu Persatuan Indonesia pada saat itu kepada generasi muda kita untuk menjadi motor yang sanggup mendobrak ke arah kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Pada akhir Kongres Pemuda ke-2 itu oleh Panitia dirumuskanlah formula “Sumpah Pemuda” untuk pertamakalinya, yang menurut ingatan saya terdiri dari Almarhum Muh. Jamin dan sdr. Jusupadi dari Pem. Indonesia, yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Serta sdr. Roesmali (sekarang Dr. Roesmali) dari Pem. Sumatera, sdr. Mokoginta (dari Pem. Minahasa) dan saya sendiri. Formul “Sumpah Pemuda” dengan suara bulat diterima oleh Kongres dan diikrarkan bersama secara khidmat pada tengah malam untuk dilaksanakan dlm organisasi dan kalangan pemuda kita masing-masing.

Serti dimaklumi juga pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 itu kepada (almarhum) sdr. W.R. Supratman telah dikaruniakan sebuah ilham Nasional gemilang dengan ciptaan lagu *Indonesia Raya* yang oleh beliau disumbangkan kepada Kongres Pemuda Kedua, lagu mana (dalam naskah pertama dan nada aslinya yang agak berlainan dengan naskah dan nada irama sekarang setelah diperbaiki) untuk pertama kali dibawakan oleh Sdr. Soepratman sendiri (diiringi dengan rombongan musiknya).

Peranan perhimpunan-perhimpunan mahasiswa (Perhimpunan Indonesia dan PPPI)

Di atas sudah disinggung betapa besar peranan perhimpunan mahasiswa kita PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) di Batavia dalam berlangsungnya Konggres Pemuda Kedua akhir Oktober 1928, yang didorong dan dipimpin langsung oleh PPPI (ketua Sdr. Soegondo). Tetapi juga wakil-wakil perhimpunan pemuda lain-lainnya yang berperan sebagai peserta dan pelaku Konggres Pemuda Kedua itu adalah mahasiswa pula, seperti Muhammad Yamin, Joesoepadi, Wongsonegoro, Adnan K. Gani, Soeharto, Soegiono, Roesmali, Mokoginta, dan lain-lain). Dan secara sangat kebetulan juga segala pembicaraan dan persiapan akan lahirnya badan fusi antara semua pemuda Indonesia itu dilangsungkan di gedung pertemuan para mahasiswa kita di Club Indonesia (Kramat 106), yang sungguh mempunyai peranan historis ditinjau dari sudut ini, ialah selaku bidan pada lahirnya Indonesia Muda.

Juga perhimpunan mahasiswa kita di Nederland PI (Perhimpunan Indonesia) telah melakukan peranan yang positif dalam mendorong sejarah generasi muda kita ke arah kesatuan baik secara moral maupun secara politis. Proses politik terhadap mahasiswa Ali Sastroamijoyo dan Mohammad Hatta tahun 1926 di Den Haag bagi seluruh pemuda kita di Indonesia merupakan cambuk yang hebat untuk bangkit sebagai satu front pemuda yang kokoh kuat. Sedangkan di bidang politik usaha PI di luar negeri dengan mengadakan konggresnya dengan pemuda pelajar international di Brussel, Paris dan lain-lain

(wakil-wakil kita antara lain pemuda Soejarwo, sekarang kuasa menteri luar negeri pertama dan berperan penting dalam perjuangan Irian Barat) memberi sumbangan pula yang tidak kecil artinya.

Prosedur pembentukan Badan Fusi dan Persiapan Indonesia Muda

Pada tanggal 23 April 1927 dalam waktu sidang bersama antara wakil Pengurus Besar Jong Sumatranen Bond (Pemuda Sumatra), Jong Bataks Bond (Pemuda Batak), Jong Ambon (Pemuda Ambon), Jong Minahasa (Pemuda Minahasa), PPPI (mahasiswa), Pemuda Indonesia dan Jong Java untuk membicarakan lebih lanjut usul Jong Java tentang rencana kerja dan rapat memutuskan sebagai berikut:

1. Indonesia Merdeka harus menjadi ideal segala anak Indonesia.
2. Segala perserikatan-perserikatan pemuda harus berdaya upaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan.

Kemudian ada usul Jong Java (Tri Koro Dharmo) untuk melancarkan satu cara kerja dan prosedur fusi yang lebih tegas dan lebih *zakelijk* terperinci dan melalui satu masa peralihan yang singkat. Dalam kongres Jong Java Ke-11 di Mataram bulan Desember 1928 diambil satu putusan prosedur dalam (15) pasal-pasal yang ternyata kemudian diterima juga oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda lainnya yang intisarinya adalah sbb :

1. Agar membentuk satu badan fusi total antara semua perhimpunan-perhimpunan pemuda Indonesia melalui satu

masa peralihan singkat guna peleburan dan pembentukan fusi itu.

2. Akan dibentuk sebuah Komisi Persiapan. Tiap-tiap perhimpunan pemuda mengirimkan dua orang wakil dalam komisi.
3. Tugas komisi ialah merencanakan segala persiapan untuk melancarkan peleburan perhimpunan-perhimpunan pemuda dan membentuk badan fusi. Untuk itu komisi merencanakan satu Program Kerja dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, mengatur hal badan-badan/perhimpunan seazas seperti kepanduan, keputrian dll.
4. Komisi menyampaikan segala rencana persiapan itu kepada Pengurus Besar masing-masing perhimpunan, yang setelah menyetujui segera mengadakan kongres pembubarannya masing-masing.

Kemudian setelah ternyata rencana kerja dan prosedur itu disetujui oleh perhimpunan masing-masing dibentuklah Komisi Besar Indonesia Muda, yang pimpinan sehari-hari diserahkan kepada tiga perhimpunan Pemuda terbesar yakni :Jong Java/Tri Koro Dharmo. Pemuda Sumatra dan Pemuda Indonesia, yang masing-masing mengirimkan 3 orang wakil dan komisi.

Susunan Komisi Besar Indonesia Muda adalah sebagai berikut :

Ketua : R. Koentjoro Poerbopranoto¹ (JJ)

Wakil ketua : Muhammad Yamin (Pemuda Sumatra)

Sekretaris Umum : R.M. Joesoepadi Danoeadingrat (Pemuda Indonesia)

Bendahara : Assaat Dt. Mudo (Pemuda Sumatra)

Anggota-anggota :

1. R.T. Djaksodipoero (Jong Java)
2. Adnan Kapau Gani (Pemuda Sumatra)
3. Mochammad Tamzil (Pemuda Indonesia)
4. R. Soediman Kartohadiprodjo (Jong Java)
5. Kroeng Raba Nasution (Pemuda Indonesia).

Dalam setahun kerja keras (1929-1930) Komisi Besar Indonesia Muda berhasil mengeluarkan sebuah risalah yang disebut, pamflet Komisi Besar Indonesia Muda, yang memuat a) anjuran/prosedur pembentukan fusi, b) rencana Anggaran Dasar, dan c) Anggaran Rumah Tangga Indonesia Muda dengan penjelasan seperlunya.

Kecuali itu Komisi Besar merencanakan sebuah lambang Indonesia Muda berbentuk perisai dan berwarna biru tua dengan simbol emas "Garuda Muda" yaitu sayap Garuda mendukung sebuah keris-ligan, yang berdiri di atas tiga landasan bunga teratai. Lambang menyimbolkan maksud suci Indonesia Muda untuk secara perjuangan (keris) menuju ke arah Indonesia Raya (sayap Garuda) berdasarkan ideologi kesatuan bangsa, tanah air dan budaya (3 teratai).

Lahirnya Indonesia Muda

Setelah prosedur fusi serta rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh perhimpunan-perhimpunan pemuda dalam konggres pembubarannya masing-masing menurut anjuran dan petunjuk-petunjuk dalam "Pamflet Komisi Besar IM", maka pada akhir tahun 1930

dapatlah diadakan konggres IM di Solo Gedung Habiproyo yang berlangsung sampai tanggal 2 Januari 1931 dan pada malam penutupan Konggres Indonesia Muda yang pertama itu dapatlah dicatat secara resmi lahirnya ksatria muda dalam gelanggang perjuangan persatuan dan kemerdekaan bangsa : Indonesia Muda yang sudah dihiasi dengan segala alat-alat perlengkapannya, pun pula sekaligus mempunyai lambang perhimpunan "Garuda Muka dengan warna benderanya merah-putih. Sebagai Ketua PB Indonesia Muda baru dipilih Sdr. Soewaji Prawirohardjo.

Pada upacara lahir itu ikatan partai-partai politik PPPKI sebagai tanda pengakuan menyampaikan satu perisai perak beserta palu pimpinan juga dari perak, oleh dua orang wakilnya yakni Mr. Singgih dan Mr. Soejoedi.

Pada konggres lahirnya Indonesia Muda yang bersejarah itu ikut pula melakukan peranan penting antara lain Ibu Bintang Soedibjo (Ibu Soed), Mr. Wongsonegoro, Dr. Soedarjo Tjokrosisworo, Dr. Roesmali, Dr. Adnan Gani, dll.

Pada konggres tersebut dipentaskan untuk pertama kalinya karya Muhammad Yamin "Kalau Dewi Tara (sudah) Berkata".

Sebagai penutup uraian singkat tentang lahirnya Indonesia Muda saja ingin memanjatkan doa dan memperingati dengan rasa khidmat jasa-jasa besar tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita antara lain J.M. Wampa, Menpen. Prof. Muhammad Yamin, Sdr. Joesopadi Danuhadiningrat, Amir Sjariffoedin, Soedarjo Tjokrosisworo dll.

Yogyakarta, 23 Desember 1962.

Coretan Pengalaman Sekitar : Sumpah Pemuda, 27-28 Oktober 1928

**Oleh :
Soegondo Djojopuspito**

Penulis coretan ini adalah Ketua PPPI dan Ketua Kongres Pemuda Kedua, yang melahirkan "Sumpah Pemuda" tanggal 28 Oktober 1928.

Coretan ini ditulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Sastra UI, Dr. Harsja W. Bakhtiar, yang mengundang penulis untuk menghadiri pertemuan peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 1969 yang diselenggarakan FS UI di gedung tempat lahirnya Sumpah Pemuda yaitu Kramat 106.

Redaksi memperoleh surat ini dari sdr. Ruben Nalenan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan Dr. Harsja W. Bakhtiar untuk dipublisir.

Redaksi.

Sdr. Bakhtiar yth.

Surat undanganmu ada di muka saya. Nanti sore jam setengah enam Fakultas Sastra Universitas Indonesia mengadakan pertemuan peringatan hari Sumpah Pemuda di Kramat 106.

Nampak di matakau gedung itu, terang sekali. Kulihat Kapau Adnan Gani (Dr. A.K Gani), Murad, Zainudin dan Masdani main bridge di serambi muka. Kulihat Karni dan Lukman main bilyard di kamar tengah. Kulihat Mr. Nazif di ruang bacaan membaca koran. Kulihat rapat terbuka yang ketiga dari *jeudcongres* itu. Sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Sjarifuddin. Saya baru saya lulus C II (Candidaat II), Yamin dan Amir C I. Saya mewakili PPPI, Yamin Jong Sumatranen Bond, Amir Jong Batak.

Jika berhadapan dengan tukang durian ngomong saya dalam bahasa Melayu boleh dikatakan lancar sekali. Amir memberi instruksi kepada empok tukang cuci saja sudah agak repot (ia dari kecil ada di negeri Belanda dan kembali di Indonesia baru di tahun 1927). Yamin sudah pernah menjadi guru sekolah desa di Minangkabau dan sudah pernah menerjemahkan buku Rabindranath Tagore (*Huis en Wereld, pen*) dari Bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Tapi ada juga untungnya saya belum pintar ngomong dalam bahasa Indonesia itu. Dalam rapat terbuka yang pertama dari *jeudcongres* itu (di gedung Katholieke Jongelingen Bond di pinggir lapangan Banteng) Komisaris Polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban rapat, telah beberapa kali menegur orang-orang yang berpidato (melalui ketua rapat) supaya jangan menyinggung soal-soal politik, yang bernada acuh tak acuh, *onverskillig* Mr. Sartono menjadi jengkel, minta bicara sebentar dan mengkritik polisi yang menganggap semua ucapan menyinggung politik. Waktu seorang pembicara yang terakhir menguraikan pandangannya tentang persatuan dengan harapan supaya Indonesia lekas menjadi negeri seperti Jepang dan lain-lain negeri yang sudah merdeka, maka polisi menegur; "*Mijn heer de voorzitter, Wilt U de spreker tot de orde roepen*"

(Tuan Ketua, sudilah Tuan menegur pembicara sampai tenang, Rn). Peringatan itu saya teruskan kepada pembicara. Setelah pidato berakhir saya berdiri dan berkata "Saudara-saudara, kita tidak usah bicara banyak-banyak. Marilah kita bersatu untuk... eh... tahu sama tahu, deh".

Tepuk tangan yang menggelora dan teriakan "tahu sama tahu, tahu sama tahu". Polisi berdiri, mukanya merah, dan memandang saya seperti anjing memandang kucing. Tepat sebelum ia mengatakan sesuatu, saya berkata "Rapat saya tutup". Dan palu jatuh di meja dengan suara yang menggelegedek. Sorenya surat-surat kabar Indonesia memuji ketangkasan saya memimpin rapat. Padahal saya tidak banyak menggunakan perkataan itu disebabkan oleh kekurangan saya dalam bahasa Indonesia.

Penting bagi sejarah ialah terjadinya resolusi yang terkenal sebagai "Sumpah Pemuda". PPPI sejak berdirinya selalu mendesak kepada perkumpulan-perkumpulan pemuda yang bernama jong ini dan jong itu untuk meleburkan diri dalam satu perkumpulan jong yang bersifat Indonesia. Mula-mula desakan itu dilakukan dengan jalan menghubungi pemimpin-pemimpin dari macam-macam jong itu secara perorangan. Sesudah berdirinya PNI (4 Juli 1927), maka PPPI mengundang perkumpulan-perkumpulan jong itu untuk merundingkan soal peleburan jong-jong menjadi satu jong. Waktu untuk mempersiapkan diri ke arah maksud itu.

Ketika Mohammad Hatta cs dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda ditangkap (Des 1927), PPPI menganggap sudah datang waktunya untuk merundingkan lagi soal peleburan, tersebut diatas dengan jong-jong itu tadi. Rapat dengan jong-jong untuk mengadakan fusi itu beberapa kali diadakan. Persoalan beralih menjadi pertentangan antara faham

fusi dan federasi (dipengaruhi oleh berdirinya badan federasi PPPKI). Yang paling keras menentang fusi ialah Jong Sumatranen Bond, yang diwakili oleh Muhammad Yamin, Akhirnya hanya dapat disetujui untuk membentuk Panitia Jeudcongres, terdiri dari wakil-wakil perkumpulan jong, yang akan mengadakan rapat-rapat terbuka dengan pidato-pidato guna menganjurkan persatuan. Saya dipilih sebagai ketua, Yamin sebagai sekretaris dan Amir sebagai bendahara. Tiga orang ini merupakan "*dagelijks bestuur*" sedang anggota lainnya dari panitia yang mewakili jong-jong tidak selalu sama orangnya (orang yang mewakili Jong Java dalam rapat panitia di bulan April umpamanya berlainan dengan orang yang mewakili Jong Java dalam rapat panitia di bulan Mei). Sebab itu saya tidak ingat lagi siapa nama orang-orang yang hadir di meja panitia dalam rapat-rapat terbuka dari Jeudcongres pada tanggal 26, 27, dan 28 itu (yang benar ialah rapat tiga kali pada tgl 27 dan 28 Oktober, yang berarti tanggal 26 tidak ada rapat, Rn).

Tapi ada fotonya dari rapat tanggal 28 Oktober, yang disimpan oleh mendiang sdr. Muhammad Yamin. Akhirnya disetujui untuk menganjurkan supaya pemuda bersatu, (bisa fusi, bisa federasi). Setelah Amir melaporkan bahwa uang yang dikumpulkan telah cukup guna biaya rapat terbuka tiga hari, maka diputuskan untuk mengadakan rapat terbuka pada tanggal 26, 27, dan 28 Oktober (hanya dua hari, Rn). Dicari orang-orang yang sedia memberi pidato, dicari tempat-tempat rapat terbuka akan diadakan (gedung Katholieke Jongelingen Bond di pinggir Lapangan Banteng, gedung Bioskop di pinggir lapangan Gambir dan Indonesich Clubgebouw di pinggir Jl. Kramat No.106).

Dalam rapat terbuka yang ketiga di Kramat 106, pada tanggal 28 Oktober 1928, ditengah pembicara, yang terakhir membaca pidatonya, maka Muhammad Yamin (sebagai sekretaris duduk di sebelah kanan saya) menyodorkan secarik kertas kepada saya, sambil berbisik, "saya mempunyai rumusan resolusi yang lebih elegan". Saya baca tulisan di kertas itu dan saya berpaling kepada Yamin, "setuju" (beserta paraf saya). Saya teruskan kepada Amir. Dia memandang saya dengan mata yang bertanya, dan saya jawab dengan memanggut-manggutkan kepala. Dia menulis "setuju" juga. Begitu pula lain-lain anggota Panitia.

Demikianlah riwayat resolusi Kongres Pemuda yang terkenal sebagai Sumpah Pemuda (diambil secara referendum). Mengapa saudara Yamin menyodorkan usul rumusannya di tempat dan saat yang tidak wajar. Mengapa tidak dalam rapat-rapat panitia sebelumnya. Saya kira untuk menghindari perdebatan yang berlarut-larut dan amandemen yang tidak elegan. Terutama mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Di waktu itu lebih banyak orang mengerti bahasa Jawa, Sunda atau Madura daripada bahasa "Melayu".

Ada peristiwa penting dalam rapat Kongres Pemuda di Kramat 106 itu yang aku ingin ceritakan juga. Di waktu istirahat sdr Soepratman (seorang wartawan yang gemar musik dan tiap hari datang di IC untuk ngobrol dengan para mahasiswa) menghampiri saya dengan permintaan apakah ia nanti boleh memperdengarkan suatu lagu gubahannya yang dinamakan "Indonesia Raya", dan memberikan kepada saya syair dari lagu itu. Saya baca syairnya sambil melirik kepada komisar polisi yang mengawasi rapat, sebab dalam syair itu ada berkali-kali disebut perkataan Indonesia dan saya khawatir timbul lagi insiden seperti pada rapat yang pertama. Saya lantas

menghampiri tuan van der Plas (ajunt Adviseur voor Inlandshe Zaken) yang memerlukan menghadiri rapat itu (barangkali untuk menyaksikan jalannya dan suasana rapat-rapat berhubung dengan keributan-keributan pada rapat yang pertama, sebab biasanya kantor ini cukup diwakili oleh tuan Datuk Tumenggung) dan menanyakan kepadanya (sambil melihat syair sdr Soepratman) apakah kiranya lagu baru itu dapat diperdengarkan. "*Vraag het niet aan mij, maar an de politie*" (jangan tanyakan itu pada saya tetapi kepada polisi, Rn).

Barangkali ia berpendapat bahwa ketua Kongres yang dimusuhi oleh polisi itu ternyata masih plonco dan tolol, terbukti dari apa yang ditanyakan kepada dia. Tentu saya saya tidak mau tanya kepada polisi yang saya pandang sebagai musuh rakyat. Saya lantas berbisik kepada sdr Soepratman, "Boleh tetapi supaya diperdengarkan lagunya saya, jangan dinyanyikan dengan syair dan perkataannya". Saya membawa biola saya, sambut sdr Soepratman. Kemudian saya minta perhatian hadirin, supaya sebagai *intermezo* suka mendengarkan sebuah lagu gubahan sdr Soepratman lagu "Indonesia Raya" kataku cemas akan adanya tindakan polisi. Sdr Soepratman lantas memainkan lagu gubahannya dengan biola. Sesudah selesai ia membungkukkan badan seperti seorang violist dalam concert. Tepuk tangan dan bis, bis, bis.

Dan beberapa minggu kemudian dalam suatu rapat di Gedung Kesenian dekat Pasar Baru (saya tidak ingat lagi rapat apa), lagu "Indonesia Raya" diperdengarkan lagi (sebagai ketua PPPI dan bekas ketua Jeudcongres saya mendapat tempat di depan). Ini kali saya berdiri dengan tidak ragu-ragu dan diikuti oleh semua hadirin. Setelah itu PNI menunjuk lagu "Indonesia

Raya” sebagai lagu kebangsaan dan diakui oleh semua perkumpulan.

Sudah beberapa kali hari Sumpah Pemuda diperingati oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda, juga di Istana Merdeka. Tidak pernah saya menerima surat undangan untuk menghadiri pertemuan peringatan hari Sumpah Pemuda itu. Baru ini kali dari Saudara.

Di surat-surat kabar orang memperingati Sumpah Pemuda dengan karangan-karangan yang penuh kesalahan-kesalahan. suratku ini adalah pernyataan terima kasihku kepada saudara.

Mudah-mudahan ceritaku ini menambah lengkapnya bahan sejarah Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya.

Lambang PPPI



PPPI mempunyai lambang perhimpunan dengan wujud gambar berupa ujung tombak, pegangan keris dan sayap garuda. Ujung tombak bersatu dengan pegangan keris berarti adanya persatuan dan gambar sayap garuda berarti merdeka. Arti keseluruhan yaitu “Kita bersatu untuk Merdeka”.

Lambang PPPI disusun Aboe Hanifah dan Chajat

Diterbitkan oleh
Museum Sumpah Pemuda
Jl. Kramat Raya No. 106 Jakarta 10420
Telp. 3103217, 3154546, Fax. 3154546 ext 18
e-mail : musda@cbn.net.id
<http://www.museumsumpahpemuda.go.id>

Perpustakaan
Jenderal

ISBN 979-98998-2-6